

**PROGRAM PENGELOLAAN BLT PEMERINTAH DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MENURUT EKONOMI ISLAM DI DESA TANJUNG TELANG
KEC. PRABUMULIH BARAT**



OLEH

**MAYA SAPITRI
NIM: 2030602190**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN
RADEN FATAH PALEMBANG UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI (S.E)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

2024

HALAMAN ACC REVISI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQQSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Maya Sapitri
NIM : 2030602190
Program Studi : Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Program Pengelolaan BLT Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam Di Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2024.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Penguji Utama

Dr. Uil Amri, Lc., M.H.I
NIP. 198308032011011011005

Palembang, 10 Juni 2024

Penguji Kedua,

Abubakar Sidik, M.E.Sy
NIP. 198807252024211017

Mengetahui,
Ketua Ekonomi Syariah

Dr. Rinol Sumantri, M.E.I
NIP. 197502142008011011

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN BIODATA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nim : 2030602190
Nama : MAYA SAPITRI
Tempat Lahir : PRABUMULIH
Tanggal Lahir : 2002-05-07
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Program Studi : S1 EKONOMI SYARIAH
Tanggal Lulus : 2024-06-05
Ukuran Toga : L

Menyatakan bahwa data diri yang saya isikan di registrasi ijazah adalah benar sesuai dengan data ijazah pendidikan terakhir. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data diri saya tersebut tidak sesuai dengan ijazah pendidikan terakhir maka saya siap menerima konsekuensi yang diberikan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 12 Juni 2024



MAYA SAPITRI
Nim.2030602190

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

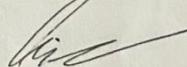
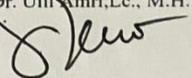
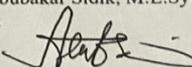
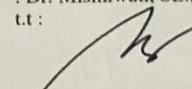
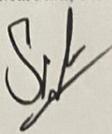
Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Maya Sapitri
NIM : 2030602190
Program Studi : Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Program Pengelolaan BLT Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam Di Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Listiawati, M.HI t.t : 
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Siti Mardiah, S.HI., M.Sh t.t : 
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Ulin Amri, Lc., M.H.I t.t : 
Tanggal	Penguji Kedua	: Abubakar Sidik, M.E.Sy t.t : 
Tanggal	Ketua Panitia	: Dr. Mismiwati, SE.,MP t.t : 
Tanggal	Sekretaris	: Siti Mardiah, S.HI., M.Sh t.t : 

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Program Pengelolaan BLT Pemerintah Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi
Islam Di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat

Ditulis Oleh : Maya Sapitri
NIM/Program Studi : 2030602190 / Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Palembang.

Palembang, 10 Juni 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. Listiawati, M.HI
NIP. 196010122006042001

Siti Mardiah, S.Hi., Msh
NIP. 198110192023212013

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (Q.S. Ar-Ra'ad/13: 11)

Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri...
-QS.Al-isra: 7

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.
-Umar bin khattab-

PERSEMBAHAN

Rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT yang telah memberikan berkah dan atas segala kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui berbagai proses yang panjang.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT telah memberikan kekuatan, kelancaran dan kemudahan.
- ❖ Kedua orang tuaku yang tercinta dan tersayang ayahanda Matsarun dan Ibundaku Hatisa yang selalu memberikan waktu, semangat, nasehat, dukungan moral maupun material serta selalu mendoakan yang tiada batas untuk kesuksesanku.
- ❖ Keempat Saudaraku, kakakku Susi Susanti, Edi Kurniawan, Nurkumala dan Adikku Yona Laura Fitri.
- ❖ Teman-teman seperjuanganku yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Serta Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	Ba	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zell	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	”	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدین عدة	Ditulis Ditulis	Muta'`aqqidin „iddah
-------------	--------------------	-------------------------

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis

هبة جشية	Ditulis Ditulis	Hibbah Jizyah
----------	--------------------	---------------

Ketentuan ini tidak berlaku untuk istilah Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti "zakat", "salat", dan istilah-istilah sejenis, kecuali bila diperlukan untuk mempertahankan pengucapan aslinya. Kata sandang "al" ditulis dengan huruf h ketika bertemu dengan kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah.

كزامة الاولياء	Ditulis	Karamahal-auliya
----------------	---------	------------------

2. Bilata'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

سكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

_____ / _____	Fathah	Ditulis	A
_____ / _____	Kasrah	Ditulis	I
_____ / _____	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah+alif	Ditulis	A
جاهلية		Jahiliyyah
Fathah+ya`mati	Ditulis	A
يظعى	Ditulis	yas`a
	Ditulis	I
Kasrah+ya`mati	Ditulis	Karim
كريم		
Dammah+wawumati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Furud
	Ditulis	

F. Vokal Rangkap

Fathah+ya`mati	Ditulis	Ai
بييتكم	Ditulis	Bainakum
	Ditulis	Au
Fathah+wawumati	Ditulis	Qaulun
قول		

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	A`antum
عدت	Ditulis	U`iddat
لننشكر	Ditulis	La`insyakart um

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	Ditulis	al-Qur`an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /(e)l)nya.

الظماء	Ditulis	as-Sama
الشمص	Ditulis	asy-Syam

3. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذويالفروض	Ditulis	zawial-furud
اهل الظنة	Ditulis	ahlas-sunnah

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian tentang dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat desa tanjung telang. Pokok permasalahannya untuk mengetahui program Bantuan Langsung Tunai sudah belrjalan delngan maksilmal sesuail tujuan yang ingin dicapai. Bagi pemerintah program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam rangka membantu meringankan beban hidup masyarakat miskin di tengah kesulitan ekonominya. Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu bentuk program bantuan sosial yang berupa tunjangan uang yang umum nya diberikan kepada masyarakat yang termasuk dalam kriteria penerima manfaat.

Jenis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Bantuan Langsung Tunai memang tidak secara langsung berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat. namun program itu membawa manfaat bagi mereka, umum nya manfaat yang diperoleh masyarakat miskin penerima Bantuan Langsung Tunai bersifat jangka pendek, yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sembako, karena beban pengeluaran yang harus ditanggung masyarakat miskin sehingga biaya kehidupan masih lebih tinggi dibandingkan dana yang diterima dari program Bantuan Langsung Tunai.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Bantuan Langsung Tunai, Ekonomi Islam

ABSTRACT

This thesis is research on the impact of Direct Cash Assistance on the welfare of the people of Tanjung Telang Village. The main problem is knowing that the Direct Cash Assistance program has run optimally according to the goals to be achieved. For government programs, Direct Cash Assistance is a form of policy to help ease the burden on the lives of poor people amidst the economic difficulties they are experiencing. Direct Assistance Cash Assistance is a form of social program in the form of cash benefits which are generally given to people who are included in the criteria for beneficiary recipients.

This type of research uses qualitative research. The data collection method used is the observation and documentation interview method. The research results show that direct cash assistance does not have a direct impact on community welfare. However, this program brings benefits to them, in general the benefits obtained by poor people who receive Direct Cash Assistance are short term, namely to meet daily needs such as basic necessities, because the burden of costs that must be borne by poor people means that the cost of living is still higher than the funds provided. . received from the Direct Cash Assistance program.

Keywords: *Welfare, Direct Cash Assistance, Islamic Economy*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Program Pengelolaan BLT Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat.”. Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan arahan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengakui bahwa ada beberapa kesalahan dan tantangan, namun dengan penuh rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ayahanda Matsarun dan Ibunda Hatisa, yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang, mendoakan serta memberikan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan rezeki kepadanya, melindungi kedua orang tua saya.
2. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag.,M.Si. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di kampus biru tercinta.

3. Dr. Heri Junaidi, M.A, selaku Dekan fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang beserta stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Dr.Rinol Sumantri, M.EI selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang yang telah membantun proses kelancaran studi penulis.
5. Dr.Listiawati.MHI selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, semangat dengan penuh kesabaran dalam proses penulisan studi penulis.
6. Siti Mardiah,SHI,MsH selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, semangat dengan penuh kesabaran dalam proses penulisan studi penulis.
7. Kepada Ibu Mulyani Rizki S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik penulis.
8. Para dosen dan asisten serta seluruh staf, UIN Raden Fatah Palembang.
9. Seluruh staf perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang.
10. Terima kasih kepada teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2020.
11. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya Moresta Juliantari, Ririn Wahyuni, Salsabila, Oppie Bella, Indah Fitri Islami, Lestia Diana dan Beli Aulia. Serta Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan pengetahuan, penulis melakukan kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan lebih lanjut. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya para peneliti selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Palembang, 20 Februari 2024
Penulis

Maya Sapitri
2030602190

DAFTAR ISI

MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Deskripsi Teori	12
1. Program	12
2. Pengelolaan	13
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	20
4. Kesejahteraan Masyarakat	29
B. Telaah Pustaka	44
C. Kerangka Berfiki	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
A. Desain Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	52
D. Obyek Penelitian	52
E. Sumber Data	52
F. Teknik Pengumpulan Data	54
G. Definisi Konseptual dan Operasional	57
H. Instrumen Penelitian Yang Digunakan	60
I. Teknik Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
B. Struktur Organisasi	64
C. BPD Desa Tanjung Telang	67

D. Data Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	68
E. Hasil Penelitian.....	71
F. Pembahasan	85
BAB V PENUTUP.....	102
A. Simpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 : Jumlah Penduduk Desa Tanjung Telang 2023-2024	7
Tabel 2. 1 : Telaah Pustaka	44
Tabel 5. 1 BPD Desa Tanjung Telang	67
Tabel 5. 7 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Telang Yang Menerima BLT Tahun 2023-2024	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka berfikir	49
Gambar 5. 1 Struktur Organisasi Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Tahun 2023-2024.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pengelolaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut ekonomi Islam penting untuk memahami dampak kebijakan tersebut pada aspek keadilan ekonomi, distribusi dana, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai relevansi program tersebut dalam konteks nilai-nilai ekonomi Islam. Dan juga penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk memperbaiki pengelolaan BLT (Bantuan Langsung Tunai), memastikan dampak, peran dan cara pemerintah dalam mensosialisasikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) di Desa Tanjung Telang terhadap kesejahteraan masyarakat.

Secara obyektif adanya program pemerintah dirasa sangat membantu dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Secara subyektif upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan hal yang menarik untuk diteliti, dikarenakan berkenaan dengan upaya yang harus dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan. Oleh karenanya dirasa sangat penting untuk mengetahui dan melakukan penelitian di bidang ini disamping tersedianya bahan atau literatur yang diperlukan tujuan Negara ini merupakan salah satu untuk mengatur kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Didalam undang-undang

No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah “kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sesuai dengan undang-undang tersebut pemerintah melaksanakan pembangunan yang diarahkan pada upaya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka membentuk indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, maka pemerintah membuat program untuk menanggulangi masalah tersebut, salah satu dari sekian banyaknya program tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Dengan tujuan untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama masyarakat miskin melalui program tersebut. Dikarenakan masih banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, tak terkecuali Kabupaten Soppeng khususnya di Desa Parenring Kecamatan Lilirilau. Sesuai pasal 33 ayat (5) PMK (Persetujuan Peninjauan Masa Kerja) 190 tahun 2021, disebutkan bahwa besaran BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa 2022 ditetapkan sebesar Rp.300.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.¹

Peran pemerintah melalui program penanggulangan kemiskinan diawali dengan keputusan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah nasional yang mendesak sehingga memerlukan penanganan

¹ Maspawati, *Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng*. Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Vol 4 No. 2 Juli 2023 e-ISSN: 2828-6340; p-ISSN: 2828-6359, hlm. 82-96 DOI: <https://doi.org/10.55606/jass.v4i2.351>. Diakses 24 November 2023

berbeda dan pendekatan sistematis, terpadu dan menyeluruh bertujuan untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara dengan baik melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang bermartabat. Terbitnya Peraturan RI (Republik Indonesia) maka terbentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota. Program yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang didalamnya termasuk Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).²

Bantuan langsung tunai atau disingkat BLT dalam bahasa Inggris juga disebut dengan *cash transfers*. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan mengatakan pengertian BLT (Bantuan Langsung Tunai) yaitu program bantuan pemerintah yang berupa uang kontan atau bantuan lain yang diberi dengan memiliki syarat ataupun tidak memiliki syarat kepada masyarakat miskin. Program pemerintah yang bertujuan untuk menekan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah program bantuan langsung tunai. Pada tahun 2020 BLT (Bantuan Langsung Tunai) kembali di luncurkan oleh Presiden Jokowi Dodo. Tujuan dari BLT (Bantuan Langsung Tunai) ini yaitu agar masyarakat dapat mempertahankan tingkat konsumsi dan membantu

² Hidayatur Rohmah, *Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam Memutus Rantai Kemiskinan: Studi di Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang*. Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah Volume 5. No. 2 hlm 5 Mei 2023. Diakses 25 November 2023

perekonomian masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 di lingkungan desa. Berdasarkan Peraturan Kementerian Desa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor 6 Tahun 2020, pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan untuk penduduk miskin yang berasal dari dana desa (Kemendes, 2019).³

Ekonomi Islam dapat dipahami sebagaimana dikutip dari beberapa pendapat. Menurut Abdul Manan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan ketidakseimbangan lingkungan.⁴

Pemerintah Desa Tanjung Telang telah menyalurkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa dengan cukup baik, namun masih terdapat fenomena gesekan antara masyarakat dengan pemerintah desa karena pembagian bantuan yang dianggap tidak adil dan terkesan tebang pilih. Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Tanjung Telang Bapak Yudiman mendapat banyak keluhan dari masyarakat dengan mendatangi kediamannya karena adanya

³ Nanang Suparman, *Efektifitas Penyaluran BLT DD Bagi Masyarakat Miskin Terdampak covid 12*. Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 2 hlm 22 2021. Diakses 25 November 2023

⁴ Yuliani, *Konsep Strategi ekonomis Syariah Terhadap Isu Kemsiskinan*, Jurnal, (Tulung Agung: STKIP PGRI Tulung Agung, 2021), hlm. 137

tebang pilih dan sikap nepotisme dari perangkat desa setempat yang akhirnya menjadikan daftar penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dana desa ini tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.⁵

Dari observasi penulis memang benar banyak masyarakat yang menganggap pemerintah Desa tidak adil dalam penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) karena masyarakat menganggap pemerintah memilih hanya keluarga dari pemerintahan Desa yang banyak menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) tersebut sehingga dalam hal ini pemerintahan seharusnya mensosialisasikan dahulu terkait BLT (Bantuan Langsung Tunai) kriteria yang seperti masyarakat yang akan menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai). Pada saat sekarang berbeda dengan masa pandemi, pada masa pandemi masyarakat penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) berjumlah lebih banyak dari pada tahun ini karena ada pengurangan alokasi dana Desa terkait BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan juga sekarang pandemi sudah mulai membaik.⁶

Berdasarkan data dilapangan diketahui bahwa warga yang melaporkan keluhan terhadap ketidak tepat sasaran BLT (Bantuan Langsung Tunai) dana desa di desa Tanjung Telang mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dana desa pada tahap 1 sampai 3, namun pada tahap 3 sampai 9 terjadi pengurangan jumlah penerima manfaat dan warga tersebut merupakan salah satu penerima manfaat yang dihapus namanya dari daftar penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana

⁵ Amruallah Dkk, (Penerima Dana BLT Desa Kebonrejo), *Wawancara*. 20 November 2023. Di Desa Tanjung Telang

⁶ Observasi di Desa Tanjung Telang 20 November 2023

Desa. Pada era pandemi banyak masyarakat yang menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan pada tahun ini penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) di Desa Tanjung Telang memang yang sudah masuk kriteria penerima salah satunya diutamakan para lansia yang memiliki KK (Kartu Keluarga) tunggal, KK (Kartu Keluarga) tunggal ini seorang lansia lanjut usia keluarga tunggal adalah lanjut usia yang terdaftar seorang diri dalam kartu keluarga, dengan kriteria: Miskin atau tidak mampu; Lanjut usia berusia 80 (delapan puluh) tahun atau lebih; Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).⁷

Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Yudiman mengatakan bahwa: anggaran dana desa yang di dapatkan di lihat dari luar wilayah dan lain sebagainya dana juga sekarang ini Desa Tanjung Telang masih termasuk Desa berkembang. Terkait BLT (Bantuan Langsung Tunai) ada aturan dari pusat dan setiap tahun berubah-ubah tahun 2022 di angka 40%, jumlah penerima pada tahun 2022 sebanyak 120 orang sedangkan tahun 2023 Covid 19 sudah hilang maka di turunkan menjadi di angka 20% dan penerima hanya 70 orang. Kemungkinan di tahunn dapat BLT (Bantuan Langsung Tunai) itu akan di hilangkan tapi belum pasti juga di hilangkan, dampak fositif perekonomian masyarakat bisa terbantu dengan adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi masyarakat tidak mampu/miskin sedangkan negatif kecemburuan sosial. Masyarakat yang mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada tahun 2023 itu luas karena mata pencarian pada masa covid 19 karena masyarakat di himbau

⁷ Observasi di Desa Tanjung Telang 20 November 2023

di rumah tetapi pada tahun 2023 ini kriteria yang menerima di lihat dari katagori miskin, KK (Kartu Keluarga) tunggal/lansia atau pun yang berhak menerima, KK (Kartu Keluarga) tunggal ini adalah seorang lansia lanjut usia keluarga tunggal adalah lanjut usia yang terdaftar seorang diri dalam kartu keluarga, dengan kriteria : Miskin atau tidak mampu; Lanjut usia berusia 80 (delapan puluh) tahun atau lebih; Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jadi pada tahun 2022 banyak katagori yang bisa mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) namun pada Tahun 2023 ada pengurangan katagori penerima.⁸

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Telang 2023-2024

Desa Tanjung Telang	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah KK
Dusun I	262	122	140	91
Dusun II	368	159	205	104
Dusun III	230	119	111	85
Dusun IV	218	107	111	70
Dusun V	299	140	151	85
Dusun VI	279	133	146	86
Dusun VII	303	156	152	98
Jumlah	1960	936	1016	619

Sumber Data: Dokumentasi Desa Tanjung Telang 2023-2024

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebagai Program kompensasi jangka pendek yang tujuan utamanya adalah menjaga agar tingkat konsumsi rumah tangga yang tergolong miskin tidak pada saat ini terutama saatkeneikan bahan-bahan pokok yang terjadi di Indonesia. Walaupun program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukan satu satunya program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, dengan demikian namun di harapkan dapat mendorong pengurangan

⁸ Yudiaman. Kepala Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat. *Wawancara*. 22 November 2023

tingkat kemiskinan. Dalam hal ini diharapkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) tepat membantu dan meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya dan mensejahterakan masyarakat

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk mengetahui program ini berjalan dengan maksimal sesuai tujuan yang ingin dicapai maka perlu adanya pengukuran program yang disebut pengelolaan. Penulis tertarik untuk meneliti tentang bantuan langsung tunai dana desa. Hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui lebih lanjut apakah program pemerintah BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa ini sudah berhasil guna, terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Permasalahan terkait penyaluran bantuan langsung tunai dana desa membutuhkan titik terang dari tinjauan ekonomi Islam, oleh sebab itu, maka penulis mengangkat permasalahan ini menjadi objek penelitian dengan judul **“Program Pengelolaan BLT Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam” (Studi Kasus di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat).**

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami peneliti hanya fokus meneliti Program Pengelolaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam” (Studi Kasus di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan cara pemerintah desa dalam mensosialisasikan bantuan langsung tunai program pengelolaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat?
2. Bagaimana Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat?
3. Bagaimana Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian
 - a) Kegunaan Teoritis
 - 1) Penelitian ini digunakan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - 2) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh dibangku kuliah.
 - 3) Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan program pengelolaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) pemerintah Desa

Tanjung Telang dan referensi serta memperkaya khazanah keilmuan khususnya di Universitas Islam NEGERI Raden Fatah Palembang.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi peneliti dan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang program pengelolaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) pemerintah Desa Tanjung Telang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- 2) Bagi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mahasiswa khususnya bagi mahasiswa (UIN Palembang) serta khusus untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi yang nantinya akan digunakan sebagai referensi atau sumber informasi lebih dalam lagi tentang program pengelolaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) pemerintah Desa Tanjung Telang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- 3) Bagi Desa Tanjung Telang. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi agar Desa Kebonrejo menjadi lebih baik dan juga menjadi contoh bagi Desa yang lain nantinya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyampaian data dan informasi pada penelitian ini penulis menyusun dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

BAB 11: LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan penjabaran dari “Program Pengelolaan BLT Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam” (Studi Kasus Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat). Serta teori-teori lain yang mendukung. Selain itu, bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian, jenis penelitian, lokasi peneliti dan sumber data serta metode analisis data yang di gunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan hasil penelitian, analisis data dan pembahasannya secara lengkap

BAB V: KESIMPULAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian saran kepada pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Program

Ada dua pengertian untuk istilah “program”, yaitu pengertian secara khusus dan umum. Menurut pengertian secara umum, program dapat diartikan sebagai rencana. Secara khusus, jika seorang siswa ditanya oleh guru, apa programnya sesudah lulus dalam menyelesaikan pendidikan di sekolah yang diikuti, maka arti program dalam kalimat tersebut adalah rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan setelah lulus. Rencana ini mungkin berupa keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, mencari pekerjaan, membantu orang tua sehingga akan memberi jawaban bahwa program masa depan menunggu keputusan orang tuanya.⁹

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasara sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya haru dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.¹⁰ Program sering dikaitkan dengan perencanaan,

⁹ Ayu Diana, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII), Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiah Indralaya. P-ISSN: 2987-8977| E-ISSN: 2987-8985 Vol. 1 No. 1 (2023) pp. hlm 157-166. Diakses 07 Januari 3034

¹⁰ Muhaimin Dkk, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 349

persiapan, dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *decine*. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran.¹¹

Program ialah segala sesuatu yang di coba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.¹² Dari sini dapat dipahami suatu program mungkin saja sesuatu yang berbentuk nyata seperti materi kurikulum, atau yang abstrak seperti prosedur, atau sederetan kegiatan dari lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Menurut Suharsimi Arikunto penulis buku yang berjudul penilaian program pendidikan, bahwa:

Program merupakan kegiatan yang direncanakan, maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan. Dengan demikian maka program itu bertujuan dan keberhasilannya dapat diukur. Memang dapat dikatakan tiap orang yang membuat program kegiatan tentu ingin tahu sejauh mana program tersebut dapat terlaksana. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan cara dan alat tertentu.¹³

2. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris

¹¹ Mudasir, *Desain Pembelajaran*, (Indragiri Hulu: STAI Nurul Falah, 2017), hlm. 1

¹² Farida Yusuf Tayipnapi, *Evaluasi Program*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018), hlm. 9

¹³ Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 2018), hlm. 1-2

tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁴

Mary Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat yaitu: Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya, dan proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan, serta adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.¹⁵

M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai

¹⁴ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 2000), hlm. 348

¹⁵Erni Tisnawati Sule Dkk, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana MediaGoup, 2015), hlm. 6

suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu arti) dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.¹⁶

Teknik pengolahan data dilakukan melalui pengolahan data dari Milles & Huberman yaitu pertama reduksi data dengan mengumpulkan dan mengelompokkan data berupa teori atau hasil penelitian orang lain tentang pengelolaan, siswa dan pengelolaan siswa. Kedua penyajian data Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa pengelolaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola sumber daya dalam organisasi yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia agar mereka dapat melakukan suatu pekerjaan yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan dapat diartikan pada dua perspektif berbeda, pertama pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi dan kedua

¹⁶ M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 15-17

pengelolaan sebagai perubahan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan. Pengelolaan juga disebut dengan kegiatan manajemen yang dapat diartikan sebagai ilmu mengatur pemanfaatan sumber daya organisasi yang dilakukan secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi mudah untuk. Pengelolaan adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi artinya pengelolaan itu kegiatan yang dilakukan bersama orang lain serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan adalah kegiatan terencana yang dilakukan oleh organisasi dalam pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki baik manusia maupun non manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah strategi yang dilakukan oleh organisasi untuk menjalankan program kerja yang telah disusun bersama para sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimilikinya.¹⁷

¹⁷ Nadjematul Faizah, *Pengelolaan Siswa Pada Sekolah Berbasis Agama Islam. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* P-ISSN: 2614-4018 Doi: 10.30868/im.v4i02.4612 E-ISSN: 2614-8846. Diakses 17 Desember 2023

a. Asas-asas pengelolaan

Asas pengelolaan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 2 dilaksanakan berdasarkan asas: Asas Tanggung Jawab Negara, Asas tanggung jawab Negara ialah dimana negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam serta memberikan manfaatnya yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan hidup masyarakat, baik untuk kesejahteraan masyarakat yang sekarang maupun masyarakat generasi kedepannya. Asas Kelestarian Dan Berkelanjutan. Asas kelestarian dan berkelanjutan ialah bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab serta kewajiban terhadap generasi selanjutnya untuk upaya pelestarian serta daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas kehidupan. Asas Keserasian Dan keseimbangan. Asas keserasian dan keseimbangan memiliki aspek untuk kepentingan ekonomi, perlindungan, serta pelestarian. Asas Keterpaduan. Asas keterpaduan merupakan asas perlindungan yang memadukan segala unsur komponen yang terkait. Asas Manfaat. Asas manfaat merupakan asas yang segala usaha dilaksanakan sesuai dengan potensi lingkungan serta sumber daya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta harkat kehidupan yang terkandung didalamnya. Asas Kehati-hatian Asas kehati-hatian ialah mengenai ketidakpastian suatu dampak usaha ataupun kegiatan karena keterbatasan ilmu pengetahuan maupun teknologi dengan meminimalisir maupun menghindari kerusakan. Asas Keadilan Asas keadilan merupakan asas yang harus mencerminkan sebuah keadilan secara profesional bagi setiap warga Negara. Asas Ekoregion Asas ekoregion adalah merupakan

sebuah asas yang dimana menyebutkan bahwa perlindungan serta sebuah pengelolaan lingkungan tersebut harus di perhatikan baik itu dari karakteristik budaya dari masyarakat setempat baik itu setempat berupa provinsi maupun sebuah desa,karakteristik juga baik diperhatikan dari sumber daya alam, kondisi geografis, ekosistem, sertakearifan local. ¹⁸

b. Pungsi-Pungsi Pengelolaan

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. ¹⁹

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Siagian mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat

¹⁸ Kementerian lingkungan hidup, *asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. menulis referensi dari internet*, 17 November 2017 <http://www.menlh.go.id/asas-perlidungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup>. Diakses 17 Desember 2023

¹⁹ M. Manulang, *dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 2001), hlm. 46

digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.²⁰

3. Pengerakan (*Actuating*)

Pengerakan atau juga bias didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian. Pengerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka. *actuating* atau juga disebut "gerakan aksi" mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawasi dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.²¹

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, instruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan (Henry Fayol).²²

Dari berbagai pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau sebuah proses yang dimulai dari perencanaan,

²⁰ Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*, (yogyakarta : BPFE, 2016), hlm. 89

²¹ Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan...*, hlm. 89

²² Sofyan Syafri, *Manajemen Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 282

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Menurut Pemerintah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) adalah bantuan untuk penduduk miskin yang berseumber dari dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa BLT-DD (Bantuan Lngsung Tunai Dana Desa) merupakan bantuan yang bersumber dari Dana Desa untuk penduduk miskin atau keluarga miskin di Desa untuk menanggulangi dan mengurangi dampak Pandemi Covid-19.²³

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki tujuan yang jelas dan sederhana yaitu sebagai penunjang konsumsi bagi rumah tangga miskin yang menghadapi kenaikan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat

²³Anwar Sanusi, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)*, (Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, 2020), hlm. 6

kenaikan harga BBM pada tahun 2005. BLT diberikan dalam bentuk transfer tunai langsung dalam empat kali cicilan lebih dari satu tahun. BLT (Bantuan Langsung Tunai) ditargetkan untuk rumah tangga miskin sebagai yang paling tidak beruntung adanya pengurangan subsidi dan paling berisiko mendapatkan dampak negatif pada konsumsi dari kenaikan harga. BLT (Bantuan Langsung Tunai) diperkenalkan lagi di tahun 2008 ketika krisis internasional di pasar keuangan dan harga pangan dikombinasikan dengan pengurangan subsidi bahan bakar. Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini merupakan program kompensasi jangka pendek yang di keluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin. karena dampak Covid-19 yang sangat berbahaya.²⁴

Bantuan Langsung Tunai BLT merupakan program kompensasi jangka pendek yang dimaksud, dalam tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran. Dan rumah tangga termasuk sangat miskin, miskin dan dekat dengan miskin (near poor), tidak kemungkinan pada saat terjadinya dampak Covid-19 dapat terjadi kemiskinan dalam negeri. Dengan ini walaupun program BLT bukan suatu program yang berkenan dalam pemecahan masalah kemiskinan, diharapkan bisa mendorong untuk penanggulangan pada kemiskinan, pada saat terjadi

²⁴ Main, C.E. *Efektivitas Bantuan langsung tunai Dana Desa bagi Masyarakat miskin terkena Covid-19*. Jurnal Politico. hlm 44 Diakses 27 November 2023

kenaikan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat menuju keseimbangan yang baru.²⁵

Bantuan Langsung Tunai BLT adalah berupa uang tunai yang diberi pada rumah tangga yang masuk dalam katagori miskin, BLT dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran dalam kurun waktu pertiga bulan sebesar Rp. 600.000, dan bulan selanjutnya Rp.300.000, Adapun tujuan dari BLT adalah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin mengakibatkan sulitnya ekonomi dan juga tingkat tanggung jawab sosial bersama. Pemerintah berharap untuk masyarakat penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) merupakan bisa dan mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

a. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, ada beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman untuk melaksanakan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁵ Irwan Akib, Risfaisal, *Bantuan Langsung Tunai*, (Equilibrium Jurnal Pendidikan Vol. 3:2, 2015). hlm 89-90 Dikases 27 November 2023

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.²⁶

b. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa

Calon penerima BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mendapat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) /BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) /pemilik Kartu Pra kerja.
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

Menurut kriteria di atas calon penerima BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai) ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu belum pernah mendapat bantuan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu bantuan PKH (Program Keluarga

²⁶ Anwar Sanusi, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa BLT-DD*, (Jakarta: Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, 2020), hlm. 7

Harapan, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) pemilik kartu Pra kerja. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena dampak dari Covid19, kemudian yang ketiga yaitu keluarga yang mempunyai penyakit menahun atau kronis. Hal tersebut karena virus ini berbahaya apabila menyerah orang yang memiliki penyakit kronis atau menahun dari ketiga kriteria tersebut harus diperhatikan dengan seksama dalam melakukan pendataan sehingga tidak terjadi data yang tumpang tindih. Penetapan calon penerima BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai) dapat dilaksanakan melalui musyawarah dan gotong royong.²⁷

c. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1) Proses Pendataan

- (a) Aparat desa memberikan data yang berisi profil penduduk berdasarkan kesejahteraan, usia, kesehatan, pendidikan, serta disabilitas
- (b) Pendataan dilakukan pada tingkat Rukun Tetangga (RT) atau tingkat jorong melalui formulir pendataan tingkat dusun.

2) Proses Konsolidasi dan Verifikasi

- (a) Petugas Pendataan mengumpulkan data dari Rukun Tetangga (RT) dan melakukan verifikasi
- (b) Petugas pendataan memastikan bahwa keluarga miskin dan rentan seperti warga lanjut usia (manula), penyandang disabilitas dan

²⁷ Anwar Sanusi, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa BLT-DD,...* hlm. 7

perempuan kepala keluarga tidak boleh terlewat dan harus menjadi prioritas utama.

(c) Hasil dari pendataan dan verifikasi akan di sampaikan kepada kepala desa.²⁸

d. Tujuan BLT Dari Kementerian Sosial

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan April 2024 adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa Ponu yang bersumber dari Dinas Sosial, Nilai BLT yang diterima sebesar Rp 900.000 yang diberikan setiap tiga bulan sekali Adapun yang menjadi tujuan dari BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.²⁹

Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari jaring pengaman sosial, maka tujuan dari bantuan langsung tunai dana desa yaitu menjaga daya beli masyarakat desa di tengah merosotnya perekonomian nasional karena pandemi

²⁸ Dessy Laras Wati, *Peranan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Pada Perkonomian Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, (Riau: Skripsi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2021). hlm. 34-36 Diakses 27 November 2023

²⁹ <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/78490/intervensi/796383/penerimaan-bantuan-langsung-tunai-dari-dinas>. Diakses 08 Juni 2024

COVID-19, membantu masyarakat desa yang miskin dan tidak mampu supaya tetap bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga masyarakat desa yang terkena PHK (Program Keluarga Harapan) dan menderita penyakit kronis. Awal tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda dunia. Salah satu dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 adalah faktor perekonomian. Di Indonesia, akibat pandemi Covid-19 selain kesehatan juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan refocusing (memusatkan atau memfokuskan) anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Salah satu pos anggaran yang dilakukan refocusing adalah Dana Desa. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Undang-Undang nomor 06 Tahun 2014, pasal 1 ayat (12) menjelaskan “Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat”. Akibat wabah virus Corona, mayoritas masyarakat mengalami kemunduran dalam ekonomi, sebab pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat. Selain dari pada itu, bagi mereka yang berjualan keliling, tidak diperkenankan masuk ke desa- desa. Hal ini dikhawatirkan mereka akan membawa penyakit karena sebelumnya bertemu dengan banyak orang di pasar. Kondisi seperti ini berlangsung cukup lama sehingga meresahkan bagi masyarakat, sebab setiap hari mereka perlu memenuhi kebutuhan pokok, berupa sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dibawah garis kemiskinan, pemerintah memperluas Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa, diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLTDD). Guna mewujudkan peraturan menteri ini, Pemerintah Desa Mekar Mandiri memberikan Bantuan Langsung Tunai. Bantuan tersebut dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD).³⁰

Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih belum terselesaikan di negara berkembang khususnya di indonesia. Kemiskinan telah hadir dalam realitas

³⁰ Teodorus Ades, *Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat di Desa Mekar Mandiri Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020*. Jurnal Pekan Vol. 7 No. 1 Edisi April 2022. ISSN: 2540 – 8038, h. 80-82

kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, Karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dengan adanya permasalahan terhadap Negara berkembang terutama kemiskinan. Maka pemerintah membuat kebijakan- kebijakan atau program-program untuk memberantas masalah tersebut. Diantaranya adalah Bantuan langsung tunai atau biasa disebut BLT. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. BLT merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Program BLT-RTS ini dalam pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin (yang terkategori sebagai RTS), mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang secara konsisten mesti benar-benar memperhatikan Rumah Tangga Sasaran yang pasti merasakan beban berat sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup ketika terjadi kenaikan harga BBM oleh karena itu, besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup penduduk miskin disebabkan kenaikan harga (inflasi) yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga BBM. Melihat dari program pemerintah tersebut, upaya pemberantasan

kemiskinan di negara Indonesia ini cukup menarik simpati masyarakat. Sehingga masyarakat awam beramai-ramai memuji pemerintah atas program BLT. Tidak mengherankan jika kemudian masyarakat pada taraf kategori mampu pun ikut menjadikan diri sebagai sasaran BLT. Tetapi program pemerintah ini dirasa kurang efektif. Karena bantuan ini sedikitnya mempunyai dua efek positif, pertama untuk menambah daya beli rakyat miskin yang pendapatannya makin turun dibawah kebutuhan rata-rata normal. Kedua, menyuntikkan dana ke wilayah miskin untuk menghidupkan daya beli yang relatif sudah sangat rendah. Dalam hal pemberian BLT ke masyarakat miskin ini tentunya ada persyaratan atau kriteria khusus. Tetapi kenyataan fungsi BLT ada yang menyalahgunakan. Fungsinya hanya membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tetapi orang menggunakannya untuk hal yang dirasa kurang penting. Intinya digunakan untuk kebutuhan- kebutuhan yang dirasa kurang penting untuk kebutuhan mereka. Selain fungsi yang disalahgunakan, Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak. Seringkali data untuk persyaratan tersebut dipalsukan, Maka bukan orang miskin lagi yang menerima Bisa saja orang lain.³¹

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas

³¹ Selviana, *Bantuan Langsung Tunai*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume III No. 2 November 2016 ISSN e-2477-0221 p-2339-2401. h. 126-126

dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).³² Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.³³

Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima. Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah *standard living, well-being, welfare, dan quality of life*. Brudeseth menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup: Kesejahteraan materi dan kesejahteraan bermasyarakat, kesejahteraan emosi, keamanan. Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan: Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan

³² Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 887

³³ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rosdakarya, 2016), hlm. 166

sebagainya. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.³⁴

Berdasarkan definisi tentang kesejahteraan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu keadaan terpenuhinya segala kebutuhan hidup baik material maupun non-material, yang dapat diukur dengan adanya pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata, sehingga dapat membuat seseorang merasa aman, sentosa, makmur, dan selamat.

Kesejahteraan terdiri dari dua macam yaitu:

a. Kesejahteraan perorangan

Merupakan kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mine*). Kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan. Sepanjang terpenuhinya kebutuhan ini tergantung dari faktor-faktor ekonomis, oleh karena itu kesejahteraan perorangan selalu merupakan saldo dari "*utilities*" yang positif dan negatif. Dalam "*utilities*" yang positif termasuk kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari semua barang langka pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan manusiawi. Dalam "*utilities*" negatif termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh barang-barang itu (seperti, terbuang waktu senggang) dan dampak-dampak negatif dari

³⁴ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 94

perbuatan-perbuatan warga lain (seperti, dampak negatif terhadap lingkungan) dimana kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan individu saja

e. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Pengertian kesejahteraan sosial juga merujuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Penyelenggaraan skema perlindungan sosial baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial yang bersifat formal adalah berbagai skema jaminan sosial, semisal tunjangan bagi orang cacat atau miskin, tunjangan pengangguran, dan tunjangan keluarga. Beberapa skema yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan sosial informal antara lain usaha ekonomi produktif, kredit mikro, arisan, dan berbagai skema jaring pengaman sosial yang diselenggarakan oleh

masyarakat setempat, organisasi sosial lokal, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).³⁵

Kesejahteraan menurut pandangan masyarakat modern yaitu suatu kondisi dimana kebutuhan pokok seseorang dapat terpenuhi, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang layak yang dapat mengangkat derajat kualitas hidupnya sehingga bisa mempunyai status sosial terhadap warga lainnya. Kemudian, menurut pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), kesejahteraan didefinisikan bahwa setiap laki laki maupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM (Hak Asasi Manusi).³⁶

Menurut David Mc Celland, kesejahteraan didapatkan ketika seseorang mempunyai etos kerja yang baik. Seseorang itu sendirilah yang mempunyai tanggung jawab atas masa depannya terhadap kesejahteraannya. Hal ini akan terjadi ketika seseorang itu bisa menjadi pesaing yang baik dan mempunyai tingkat keinginan untuk berprestasi di dalam diri sendiri.³⁷

³⁵Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 2-3

³⁶Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), hlm. 24

³⁷Luthfi J. Kurniawan, dkk, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2017), hlm. 11

Menurut Sadono Sukirno, kesejahteraan adalah suatu aspek yang tidak hanya mementingkan tentang pola konsumsi tetapi juga pengembangan potensi atau kemampuan setiap manusia menjadi sangat penting sebagai modal untuk mencapai suatu kesejahteraan hidup.³⁸

Berdasarkan pengertian kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi seseorang yang dipertanggung jawabkan atas kebutuhannya melalui semangat kerja yang baik. Sehingga, segala kebutuhannya dapat terpenuhi baik itu kebutuhan material maupun non material, yang dapat dilihat dari pendapatan yang diterima, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan menyeluruh, dan pendidikan yang mudah dijangkau.

M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membant yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-

³⁸ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 59

pembagian sosia lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, siste yang kompleks dan selalu berubah,atau jaringan relasi sosial.³⁹

Jadi, masyarakat timbul dari adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan berkerja sama. Dalam waktu yang cukup lama itu, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental. Ekonomi Islam kini telah menjadi pembahasan tersendiri pada masa modern sekarang ini. Kajian-kajian telah banyak dilakukan oleh paraulama mengingat pada masa awal pertumbuhan Islam, ekonomi Islam belum muncul sebagai sebuah disiplin keilmuan. Meskipun demikian, pondasi atau landasan dasarnya telah terealisasi di dalam sejarah Islam, sehingga hal inilah yang merupakan warisan yang terus menjadi sumber bagi berkembangnya nilai-nilai ekonomi Islam. Para ulama berperan besar di dalam memberikan penjelasan kepada para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan muamalahnya.⁴⁰

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan *syara'* (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 137

⁴⁰ Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, *Volume 6 Nomor 2 EdisiFebruari* 2021. P-ISSN : 2460-9595. E-ISSN : 2686-5149. Diakses 18 Desember 2023

menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴¹

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Hal ini berawal dari kerja sama antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan, antara lain, *syirkah*, *qirad*, dan *khiyar* dalam perdagangan. Selain itu, juga diperkenalkan sistem *musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzara'ah* dalam bidang pertanian dan perkebunan. Para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran. Mereka tidak mengurangi timbangan di dalam berdagang.

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari'ah, yakni terjaganya agama (*ad-ddin*), terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*) dan terjaganya harta (*al-mal*). Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. Tercukupinya

⁴¹ Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021. P-ISSN : 2460-9595. E-ISSN : 2686-5149. Diakses 18 Desember 2023

kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata. Menjamin kebebasan individu. Kesamaan hak dan peluang. Kerjasama dan keadilan. Simpulan Makna Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep kesejahteraan ekonomi syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai.

Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata. Menjamin kebebasan individu. Kesamaan hak dan peluang. Kerjasama dan keadilan. Simpulan Makna Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep

kesejahteraan ekonomi syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai.⁴²

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.⁴³

Membahas definisi ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah akhlak, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada Al-Qur’an dan As-Shunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Ekonomi dalam istilah bahasa Arab di ungkapkan dengan kata *al-iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Dari makna ini, kata *al-iqtisad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna ilmu *al-iqtisad* adalah ilmu yang membahas ekonomi. Secara terminologis, seorang ahli

⁴² Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021. P-ISSN : 2460-9595. E-ISSN : 2686-5149. Diakses 18 Desember 2023

⁴³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 14

mengemukakan pendapat mengenai ilmu ekonomi Islam. S.M Hasanuzzaman memiliki pandangan bahwa: Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian, serta pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.⁴⁴

Umar Chapra mendefinisikan, ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis. M. Abdul Manan mendefinisikan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴⁵ Al-Ghazali mendefinisikan, ekonomi Islam yaitu ekonomi Ilahiah, artinya ekonomi Islam sebagai cerminan watak ketuhanan/Ilahiah', ekonomi Islam yang bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan/ sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi, yaitu dustur ilahi atau aturan syari'ah.⁴⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yakni terpenting

⁴⁴ Amiruddin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 27

⁴⁵ M. Abd. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2018), hlm. 19

⁴⁶ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), hlm. 60

dapat terpenuhinya kebutuhan pokok/ *dharuriyat (maqasid al-shari'ah)*/ memelihara 5 hal, seperti : agama, jiwa, *aql*, keturunan, dan harta agar bisa merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*halalan toyyiban*).

a. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Islam telah mengajarkan segala sesuatunya dalam Al-Qur'an baik itu urusan dunia maupun ukhrawi. Berdasarkan definisi para ahli yang telah dibahas sebelumnya, maka terdapat berbagai prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam didasarkan atas empat nilai universal, yakni: *Tauhid, adl, khilafah*, prinsip keseimbangan.⁴⁷

b. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa

⁴⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 13-15

hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*⁴⁸

Menurut Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuthi. Ayat diatas menjelaskan bahwa (Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1971), hlm. 46

(sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan.

Sesangkan menurut Ismail Bin Umar Al-Quraisyi Bin Katsir. Ayat diatas menjelaskan. Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang mempunyai utang sejumlah harta, sedangkan pemiutang (yang punya piutang) tidak mempunyai bukti yang kuat. Lalu lelaki tersebut mengingkari utangnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang hak, dan bahwa dirinya berada di pihak yang salah (berdosa) dan memakan harta haram. Hal yang sama diriwayatkan oleh Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, As-Saddi, Muqatil Ibnu Hayyan, dan Abdur Rahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, bahwa mereka pernah mengatakan, "Janganlah kamu membuat perkara, sedangkan kamu mengetahui bahwa dirimu berada di pihak yang zalim."

Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat diatas. Diharamkan atas kalian memakan harta orang lain secara tidak benar. Harta orang lain itu tidaklah halal bagi kalian kecuali jika diperoleh melalui cara-cara yang ditentukan Allah seperti pewarisan, hibah dan transaksi yang sah dan dibolehkan. Terkadang ada orang yang menggugat harta saudaranya secara tidak benar. (1) Untuk mendapatkan harta saudaranya itu, ia menggugat di hadapan hakim dengan memberi saksi dan bukti yang tidak benar, atau dengan memberi sogokan yang keji. Perlakuan seperti ini merupakan perlakuan yang sangat buruk yang akan dibalas dengan balasan yang buruk pula. (1) Ayat ini mengisyaratkan bahwa

praktek sogok atau suap merupakan salah satu tindak kriminal yang paling berbahaya bagi suatu bangsa. Pada ayat tersebut dijelaskan pihak-pihak yang melakukan tindakan penyuapan. Yang pertama, pihak penyuap, dan yang kedua, pihak yang menerima suap, yaitu penguasa yang menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan kepada pihak penyuap sesuatu yang bukan haknya.⁴⁹

2) Hadits

Hadits memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Sa'id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.⁵⁰

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memadharati diri sendiri dan orang lain.*⁵¹

Sesungguhnya masih banyak lagi definisi ekonomi Islam yang di paparkan oleh para pemikir yang konsen terhadap perkembangan ekonomi Islam, akan tetapi kiranya dari beberapa definisi di atas, seyogyanya dapat mewakili definisi-definisi ekonomi Islam yang sudah ada, sehingga dapat dikonklusikan bahwa menurut Islam ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia

⁴⁹ <https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-188/#tafsir-quraish-shihab>. Diakses 18 Desember 2023

⁵⁰ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, hlm. 743

⁵¹ HR. Ibnu Majah no. 2341, Thabrani dalam Al Kabir no. 11806, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani –rahimahullah– dalam Shahih Al Jami' no. 7517.

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah di dunia dan akhirat.

B. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis lebih dulu melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu atau karya-karya ilmiah yang mendukung topik yang akan dibahas oleh peneliti. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 2.1 Telaah Pustaka

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Penelitian yang dilakukan oleh Aminuddin Usbalanuri. Sistem Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Desa Sali Kabupaten Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)	Ketentuannya di peroleh masyarakat miskin setiap 1 bulan mulai dari bulan April s/d Juni tahun 2020 sebesar Rp 600.000 dan Juli tahun 2020 s/d Juni 2021 sebesar Rp300.000 dan akan berlanjut setiap bulan sampai pada batas waktu yang belum ditentukan.	Sama-sama mengunakan metode Kualitatif sedangkan perbedaanya skripsi yang ditulis oleh Aminuddin Usbalanuri fokus pada sistm pengelolaan BLT sedangkan penulis fokus pada Program Pengelolaan BLT Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
2	Penelitian yang dilakukan oleh Basyirah Mustarin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program BLT Pada Masa Pandemi Covid 19	Akibat kurang adanya transparansi dan terjadinya pemotongan dana untuk bantuan BLT	Sama-sama meneliti BLT sedangkan perbedaanya Pengelolaan BLT masa Pandemi, BLT untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
3	Penelitian yang di tulis oleh Paramita Djako. Pengaruh Pemberian Bantuan Langsung	Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki pengaruh	Sama-sama meneliti BLT sedangkan perbedaannya

	Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo	positif sebesar 0,781 dan signifikan pada alpha 0,05 terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo	penelitian yang di tulis oleh Paramita Djako menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.
4	Penelitian yang di tulis oleh Wahyu Nasikhatul Khasanah. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam: Implementasi BLT Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.	Kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai social	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya penelitian yang di tulis Wahyu Nasikhatul Khasanah fokus pada implementasi BLT sedangkan penulis Program Pengelolaan BLT.
5	Penelitian yang ditulis Putri Maulya. Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa BLT pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Desa Jaharun B	Pengelolaan BLT pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 sudah dilakukan sesuai kriteria masyarakat penerima BLT-Dana Desa	Penggunakan metode kualitatif, perbedaannya penelitian yang ditulis Putri Maulya fokus pada Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa BLT pada Masa Pandemi Covid-19 sedangkan penulis fokus pada Program Pengelolaan BLT Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
6	Penelitian yang di tulis oleh Ririn Lilis Suryani. Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bamban Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur	Besarnya efektivitas program BLT dana desa di desa Bamban kecamatan Benua Lima kabupaten Barito Timur dengan nilai Presentasinya adalah	Meneliti BLT sedangkan dan penelitian yang di tulis oleh Ririn Lilis Suryani menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan

		84,5%.	penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.
7	Penelitian yang di tulis oleh Milenia Jenifer Poluakan. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Covid19 Di Kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa.	Pemerintah memberi dukungan pada daerah melalui instrumen transfer ke daerah. Salah satu dukungan dari pemerintah tersebut diberikan kepada daerah dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai yang biasa disebut BLT	Sama-sama metode penelitian kualitatif dan perbedaannya penelitian yang di tulis oleh Milenia Jenifer Poluakan fokus pada implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) sedangkan penulis fokus pada program BLT untuk mensejahterakan masyarakat.
8	Penelitian yang ditulis oleh Made Ngurah Duwipantara. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 di Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.	Dari segi ketepatan menentukan pilihan pada penelitian ini disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sama-sama metode penelitian kualitatif dan perbedaannya penelitian yang di tulis Made Ngurah Duwipantara fokus pada efektivitas bantuan langsung tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin sedangkan penulis fokus pada program pengelolaan bantuan langsung tunai.
9	Penelitian yang ditulis oleh Masri Arfandi. Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Penerima Manfaat (Studi kasus Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli).	Masyarakat penerima manfaat di Desa Tende kecamatan galang Kabupaten Tolitoli berperan besar dalam proses maupun penyalurannya karena Pemerintah Desa tende telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai arahan	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya penelitian yang di tulis oleh Masri Arfandi fokus pada peran pemerintah Desa Dalam penyaluran bantuan langsung

		Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 tentang sasaran penerima BLT Dana Desa serta menerapkan pendekatan Model Pemerintahan yang baik yang meliputi Aspek Hukum, Konsensus orientasi, Keadilan, Efisiensi dan efektivitas.	tunai kepada masyarakat sedangkan penulis fokus pada Program pengelolaan BLT.
10	Penelitian yang di tulis oleh Rini Sandrawati. Efektifitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Selama Pandemi Covid-19 di Desa Sebagian, Kabupaten Bangka Selatan	Dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 khususnya dibidang perekonomian jika dilihat efektivitasnya melalui ketepatan waktu, untuk bulan pertama hingga dua bulan berikutnya sudah efektif namun, untuk bulan selanjutnya tidak tepat waktu karena pencairan dilakukan 2-3 bulan sekali	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya penelitian yang ditulis oleh Rini Sandrawati fokus pada efektifitas kebijakan bantuan langsung tunai dana Desa selama Pandemi Covid-19 di Desa Sebagian, Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan penulis fokus pada program pengelolaan BLT.

Alasan penulis mengambil judul penelitian yang mirip dengan penelitian sebelumnya untuk menyoroti keterkaitan atau kelanjutan dari penelitian tersenut. Ini dapat membantu dalam membangun landasan teori yang kuat atau mengeksplorasi dimensi tambahan dari topik yang sama, selain itu, judul serupa dapat meningkatkan visibilitas penelitian baru dengan merujuk pada penelitian sebelumnya yang telah di kenal.

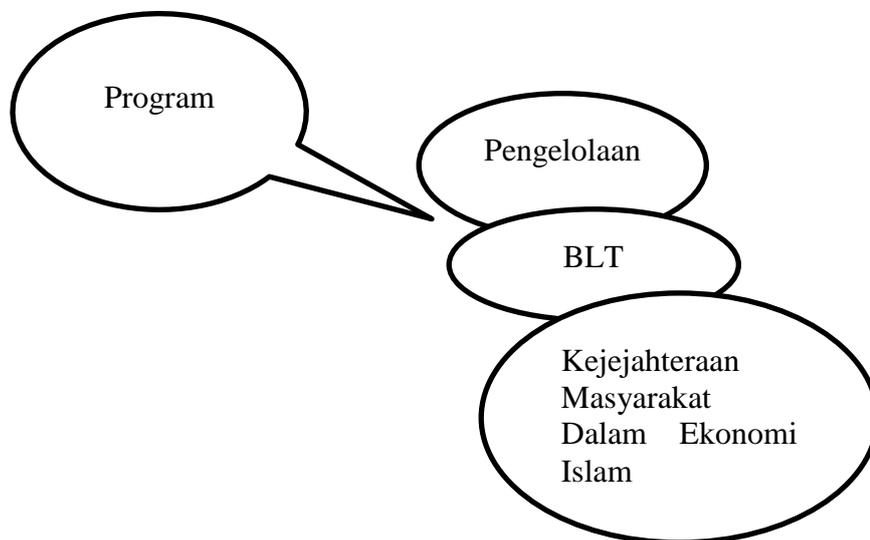
Penulis mengambil judul penelitian yang mirip dengan penelitian terdahulu karena memiliki beberapa manfaat bagi penulis diantaranya adalah:

1. Judul yang mirip dapat menunjukkan adanya kontinuitas atau kelanjutan dari penelitian sebelumnya. Membantu membangun kerangka kerja yang lebih lengkap dan memperkaya pemahaman terhadap topik tersebut.
2. Judul yang serupa dapat menjadi cara untuk merujuk pada penelitian terdahulu, mengaitkan temuan baru dengan temuan yang sudah ada. Ini memperkuat basis pengetahuan dan konstek penelitian.
3. Judul yang mirip dapat meningkatkan visibilitas penelitian, terutama jika penelitian sebelumnya memiliki dampak atau telah diakui. Hal ini dapat mendukung penyebaran hasil penelitian dan meningkatkan citra penelitian
4. Judul yang mirip dapat menunjukkan bahwa penelitian ini terkait erat dengan literatur terkini, membantu peneliti memahami perkembangan terbaru dan relevansi topik dalam konteks masa kini.
5. Menyusun judul yang mirip dengan BLT dapat membantu dalam membangun atau memperdalam basis teoritis, menggambarkan penelitian sebagai kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan yang sudah ada.

Dapat penulis simpulkan bahwa dari penelitian sebelumnya yang penulis baca penelitian terdahulu juga menggunakan metode penelitian kualitatif sama dengan yang akan penulis teliti dan juga penelitian sebelumnya juga meneliti masalah-masalah yang berkenaan dengan BLT. Dan juga dari penelitian terdahulu diatas mencakup pemahaman mendalam mengenai efektivitas, dampak sosial

ekonomi, dan tantangan implementasi dari program yang di buat pemerintah dan juga dari penelitian yang terdahulu di atas adanya faktor-faktor yang mempengaruhi BLT, peran masyarakat dalam penerimaan program, rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

C. Kerangka Berfikir



Gambar Bagan 2.1

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Lebih lanjut Nazir menyatakan, jenis desain penelitian ada enam yaitu. Desain penelitian yang ada kontrol. Desain ini adalah desain percobaan atau desain bukan percobaan dan mempunyai kontrol. Desain penelitian Deskriptif-analitis. Desain penelitian deskriptif merupakan studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan desain penelitian analitis adalah studi untuk menguji *hipotesa-hipotesa* dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan. Desain penelitian lapangan atau bukan. Penelitian ini menggunakan lapangan atau tidak. Desain penelitian dalam hubungan dengan waktu. Penelitian dengan menggunakan interval waktu tertentu. Desain dengan tujuan evaluatif atau bukan. Desain penelitian evaluatif atau bukan berhubungan dengan keputusan administratif terhadap aplikasi hasil penelitian. Desain penelitian dengan data primer/sekunder. Dalam penelitian dapat didesain menggunakan data primer atau data sekunder.

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, dan fungsinya sebagai pendukung tugas penelitian sebagai instrumen. Dengan demikian kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subyek atau informan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sejenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar

alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Hal ini dilakukan karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat difahami jika dipisahkan dari konteksnya. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif.⁵²

Pendekatan kualitatif menurut Kriek dan Miller dalam buku Moleong menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.⁵³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti pemilihan lokasi atau site selection berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti. Lokasi penelitian adalah (Studi Kasus Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat) dan untuk mengetahui Program Pengelolaan BLT Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam.

⁵² Lincoln & Guba, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hills: Sage Publication, 2021), hlm. 114

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 23

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023/2024 selama 6 bulan yaitu dari pemberian SK dari kampus sampai selesai waktu yang telah di tentukan kampus. Dan dengan waktu yang di tentukan kampus penulis akan secepat mungkin menyelesaikan penelitian ini.

D. Obyek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses. Peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif ini dikarenakan peneliti akan langsung masuk ke obyek. melakukan penjelajahan dengan *grant tour question*. sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas.⁵⁴ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah mengenai Program Pengelolaan BLT Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam” (Studi Kasus Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat).

E. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung, CV Alfabeta, 2016), hlm. 147

menjamin keberhasilan.⁵⁵ Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data.⁵⁶

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian lapangan. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara langsung dari subjek yang meliputi:

- a. Informan, kepala Desa, masyarakat serta perangkat Desa yang dapat memberikan keterangan, sumber data maupun informasi langsung dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, sehingga data penelitian ini menjadi lengkap.
- b. Document, yaitu seluruh data yang sudah didokumentasikan yang berkaitan dengan penelitian guna untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada

⁵⁵ Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 49

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137

pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain.⁵⁷ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku pustaka, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang menunjang proses penelitian mengenai Program Pengelolaan BLT Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam” (Studi Kasus Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. maka peneliti tidak akan menemukan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif. pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah). sumber data primer. dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi. wawancara dan dokumentasi. Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.⁵⁸ Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2017, hlm. 137

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 134

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁵⁹ Dalam observasi secara langsung ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di dalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer. Observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai Program Pengelolaan BLT Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam” (Studi Kasus Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat).

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁶⁰ Dalam melaksanakan teknik wawancara (*interview*), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 310

⁶⁰ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 135

(tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.⁶¹

Wawancara terstruktur adalah proses wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Dalam wawancara terstruktur runtunan pertanyaan-pertanyaan dan perumusannya sudah “harga mati” artinya sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah.⁶² Wawancara dilakukan secara partisipatif disertai adanya keterbukaan, berdasarkan panduan, mendalam, direncanakan, dan dipersiapkan dengan kondisi nyaman serta baik untuk dikomunikasikan.⁶³ Didalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait Program Pengelolaan BLT Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam” (Studi Kasus Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat).

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 203

⁶² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 163

⁶³ Afifuddin Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021), hlm. 130

a. Kepala Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat

a. Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perolehan data dalam penulisan skripsi ini

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁶⁴ Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

G. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Program

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. Adanya

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, hlm. 149

perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Manila, 2006: 43).⁶⁵

2. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen.⁶⁶ Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin. uga mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.⁶⁷

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.⁶⁸

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (bahasa Inggris: *cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau

⁶⁵https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1097/5/121801025_file%205.pdf.
Diakses 27 November 2023

⁶⁶ Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: PT. Tema Baru, 1989), hlm. 129

⁶⁷ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 1

⁶⁸ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 2018), hlm. 348

beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.⁶⁹

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup.⁷⁰ Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, dan kesukaran). Selamat-selamat tidak kurang suatu apa pun. Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman (kesenangan hidup) dan kemakmuran.⁷¹

Masyarakat adalah kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya sehingga memiliki ciri kehidupan yang khas. Masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan mengikuti satu cara hidup tertentu. Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan,

⁶⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_langsung_tunai. Diakses 27 November 2023

⁷⁰ Sudarman Danim, *Transformasi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), hlm. 7

⁷¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 1051

tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.⁷² Ekonomi didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya. Pada umumnya ekonomi di definisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi yang dimaksud persepektif ekonomi islam adalah cara pandang yang menyangkut pengelolaan sumber daya ekonomi secara islami baik dalam dimensi individual maupun institusional untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.⁷³

Adapun Islam berarti juga damai ataupun selamat. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntunan moral bagi aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan tuhanNya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta.⁷⁴

H. Instrumen Penelitian Yang Digunakan

Penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya, instrumen yang dapat digunakan antara lain:

1. Instrumen Observasi atau Pengamatan

⁷² Sri Raharju Djatimurti Rita Hanafie, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hlm. 83-84

⁷³ Rozalina, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2

⁷⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 7

Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif peneliti harus memahami terlebih dahulu variasi pengamatan dan peran-peran yang dilakukan peneliti.

2. Instrumen Wawancara

Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat mengungkap informasi lintas waktu, yaitu berkaitan dengan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan data yang dihasilkan dari wawancara bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas, sehingga mampu membentuk informasi yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkap penelitian kualitatif.

3. Instrumen Dokumen

Dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari obyek yang diteliti.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan

angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.⁷⁵

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan: Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. *In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process.* Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.⁷⁶

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁷⁷

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan

⁷⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 66

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 335-336.

⁷⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), hlm. 85-89

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif.

Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan *emik*, yaitu dari kacamata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik)

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBEHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Letak geografis Desa Tanjung Telang ini berada di LU/LS: -0.286620 BB/BT: 100.409.060 sedangkan luas wilayahnya 13000 KM persegi.⁷⁸ Awal mula Desa Tanjung Telang, pada tahun 1942 sebelum kemerdekaan, di saat penjajahan jepang atau disebut juga dengan zaman Nippon, ada suatu permukiman penduduk yang terletak 5 KM di sebelah Utara Desa Tanjung Telang, namanya Dusun Srek kalau pemerintah menyebutnya Dusun Serai. Seiring berjalannya waktu warga Dusun Srek atau Serai banyak yang pindah ke Talang Katib Kabul di karenakan Dusun Srek tersebut kurang strategis dan sering terjadi banjir. Lama kelamaan seluruh warga kampung Srek tersebut pindah ke Talang Katib Kabul, dan terbentuklah kampung besar dan menjadi sebuah Desa. Dikarenakan di sana ada satu pohon Tanjung yang sangat besar dan ada sungai Telang. Maka Desa tersebut diberi nama Desa Tanjung Telang.⁷⁹

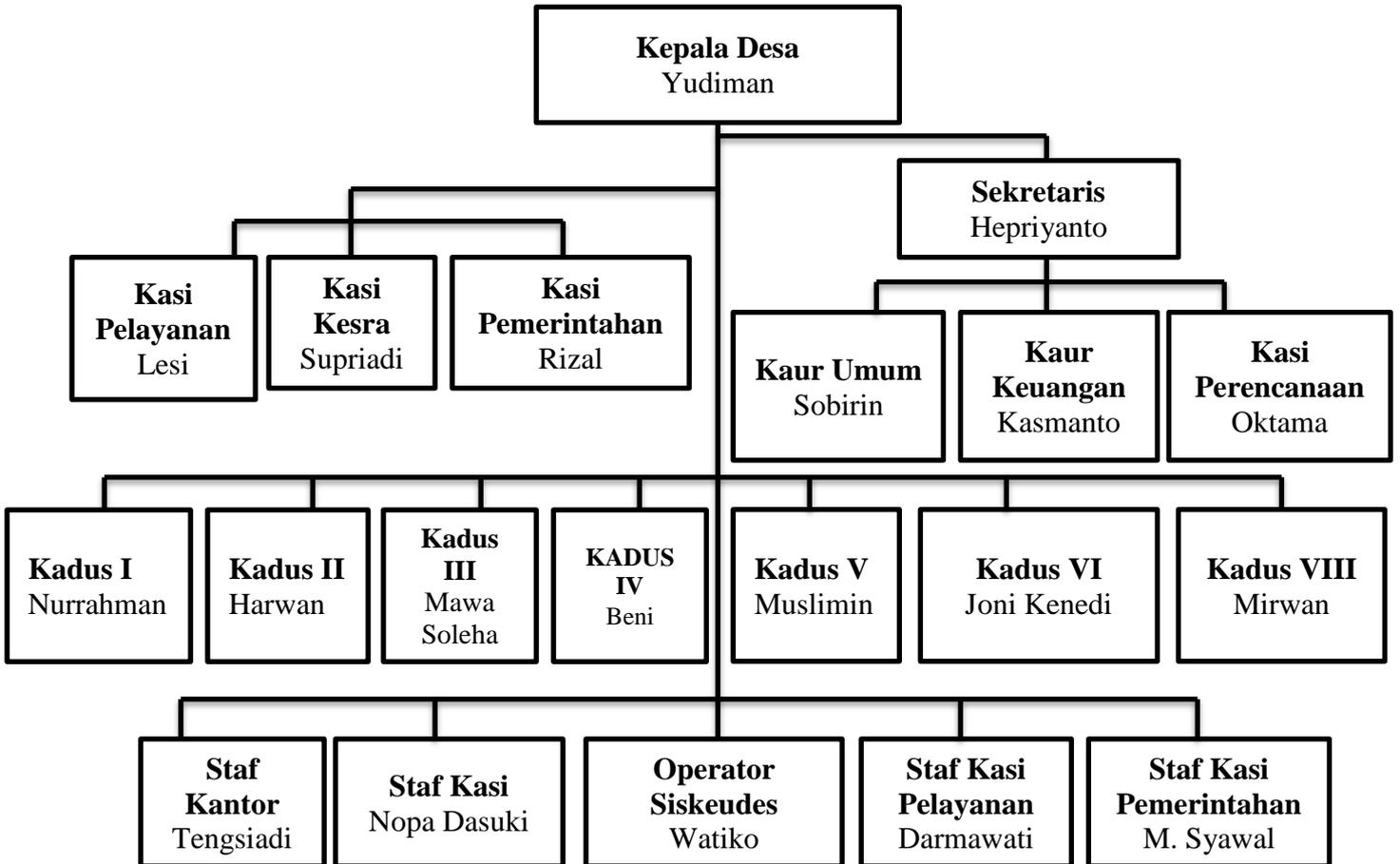
B. Struktur Organisasi

Struktur pemerintahan Desa merupakan susunan organisasi yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Struktur ini terdiri dari berbagai komponen yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan Desa. Di bawah ini adalah struktur pemerintahan Desa Tanjung Telang.

⁷⁸ Yudiman, Kepala Desa Tanjung Telang, *Wawancara*. 21 Februari 2024

⁷⁹ Kasmin, Tokoh Agama Desa Tanjung Telang, *Wawancara*. 21 Februari 2024

**Gambar 5.1 Struktur Organisasi Desa Tanjung Telang
Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabunulih 2023-2024**



Sumber Data: Dokumentasi Desa Tanjung Telang 2023-2024

Berikut ini tugas-tugas dari nama yang ada didalam struktur pemerintahan Desa

Tanjung Telang adalah

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Sekretaris bertugas Sekretaris Desa mempunyai tanggung jawab untuk membantu Kepala Desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat
3. Kepala Seksi (Kasi) pelayanan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas.
4. Kepala seksi kesejahteraan (Kasi Kesra) ini bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
5. Kasi pemerintah Desa bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam struktur Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sesuai bidang tugasnya.
6. Kaur umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan
7. Kaur Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa). Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes

8. Kadus yakni membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Dan di bantu dengan staf, staf merupakan sekelompok orang yang bekerja sama membantu ketua dalam mengelola sesuatu. Sedangkan karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah).

C. BPD Desa Tanjung Telang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Berikut ini BPD Desa Tanjung Telang.

Tabel 5.1 BPD Desa Tanjung Telang 2023-2024

No	Nama	Jabatan
1	Juaman	Ketua
2	Amirudin	Wakil
3	Rafika	Sekretaris
4	Dedi Arman	Anggota
5	Armisi	Anggota
6	Endang Kurnia	Anggota
7	Hedin Safitri	Anggota

Sumber Data: Dokumentasi Desa Tanjung Telang 2023-2024

Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut. Tugas Badan Permusyawaratan Desa Menggali aspirasi masyarakat. Menampung aspirasi masyarakat. Mengelola aspirasi masyarakat. Menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penyelenggarakan musyawarah Desa. Membentuk panitia

pemilihan Kepala Desa. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Data Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Di bawah ini adalah nama-nama masyarakat Desa Tanjung Telang yang menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai). Tentu Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dimohon bijaksana dalam penggunaan bantuan yang didapat. Dana yang diberikan harus digunakan untuk kebutuhan pokok yang memang penting dan mendesak.

5.7 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Telang Yang Menerima BLT TAHUN 2023-2024

No	Nama	Jumlah	Tanggal
1	Cik Mali	Rp 900.000	10 Maret 2024
2	Harun J	Rp 900.000	10 Maret 2024
3	Nuryama	Rp 900.000	10 Maret 2024
4	Ahiya	Rp 900.000	10 Maret 2024
5	Nangasim	Rp 900.000	10 Maret 2024
6	Nursema	Rp 900.000	10 Maret 2024
7	Yusnama	Rp 900.000	10 Maret 2024
8	Miyati	Rp 900.000	10 Maret 2024
9	Nurmala	Rp 900.000	10 Maret 2024
10	Nanian	Rp 900.000	10 Maret 2024
11	Homiya	Rp 900.000	10 Maret 2024
12	Rodian	Rp 900.000	10 Maret 2024
13	Cik Ayuna	Rp 900.000	10 Maret 2024

14	Cik Sening	Rp 900.000	10 Maret 2024
15	Rumya	Rp 900.000	10 Maret 2024
16	Rijah	Rp 900.000	10 Maret 2024
17	Oliya	Rp 900.000	10 Maret 2024
18	Syamsudi	Rp 900.000	10 Maret 2024
19	Maiya	Rp 900.000	10 Maret 2024
20	Nina	Rp 900.000	10 Maret 2024
21	Kowi	Rp 900.000	10 Maret 2024
22	Mistika	Rp 900.000	10 Maret 2024
23	Mardiana	Rp 900.000	10 Maret 2024
24	Samidut	Rp 900.000	10 Maret 2024
25	Mina	Rp 900.000	10 Maret 2024
26	Asmadi Gaul	Rp 900.000	10 Maret 2024
27	Nurhaya	Rp 900.000	10 Maret 2024
28	Mariha. W	Rp 900.000	10 Maret 2024
29	Miya	Rp 900.000	10 Maret 2024
30	Kamina	Rp 900.000	10 Maret 2024
31	Sahyu	Rp 900.000	10 Maret 2024
32	Leniana	Rp 900.000	10 Maret 2024
33	Homya	Rp 900.000	10 Maret 2024
34	Sulija	Rp 900.000	10 Maret 2024
35	Nuryama	Rp 900.000	10 Maret 2024
36	Yamina	Rp 900.000	10 Maret 2024
37	Risning	Rp 900.000	10 Maret 2024
38	Yuhanis	Rp 900.000	10 Maret 2024
39	Sartini	Rp 900.000	10 Maret 2024
40	Sumiya	Rp 900.000	10 Maret 2023
42	Sainina	Rp 900.000	10 Maret 2023
42	Partina	Rp 900.000	10 Maret 2023
43	Suni	Rp 900.000	10 Maret 2023
44	Sopen	Rp 900.000	10 Maret 2023
45	Jahalip	Rp 900.000	10 Maret 2024
46	Biden	Rp 900.000	10 Maret 2024
47	Yamida	Rp 900.000	10 Maret 2024
48	Sunayu	Rp 900.000	10 Maret 2024
49	Suryati	Rp 900.000	10 Maret 2024
50	Makiyam	Rp 900.000	10 Maret 2024
51	Suhiwa	Rp 900.000	10 Maret 2024
52	Cik Asan	Rp 900.000	10 Maret 2024
53	Yuliana	Rp 900.000	10 Maret 2024
54	Abunawi	Rp 900.000	10 Maret 2024

55	Maila	Rp 900.000	10 Maret 2024
56	Esmawati	Rp 900.000	10 Maret 2024
57	Tumik	Rp 900.000	10 Maret 2024
58	Asena	Rp 900.000	10 Maret 2024
59	Hasyama	Rp 900.000	10 Maret 2024
60	Julia	Rp 900.000	10 Maret 2024
61	Sadi	Rp 900.000	10 Maret 2024
62	Sukeni	Rp 900.000	10 Maret 2024
63	Rohana	Rp 900.000	10 Maret 2024
64	Rusmania	Rp 900.000	10 Maret 2024
65	Yusmiana	Rp 900.000	10 Maret 2024
66	Yahma	Rp 900.000	10 Maret 2024
67	Karem	Rp 900.000	10 Maret 2024
68	Elwadi	Rp 900.000	10 Maret 2024
69	Misti	Rp 900.000	10 Maret 2024
70	M. Tunggu	Rp 900.000	10 Maret 2024

Sumber Data: Dokumentasi BLT Desa Tanjung Telang 2023-2024

Dari data di atas bahwa jika kemarin ada yang mendapat BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) tapi tahun ini tidak, hal tersebut bukan karena masalah suka dan tidak suka, tapi karena porsi untuk BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) memang dikurangi. Penetapan KPM (Kader Pembangunan Manusia) sudah dilaksanakan melalui proses musyawarah di Desa. Calon KPM (Kader Pembangunan Manusia) juga melalui tahap verifikasi agar tidak terjadi dobel penerimaan bantuan. Kepala Desa berharap agar bantuan lebih bermanfaat dan bisa membantu mencukupi kebutuhan keluarga pemaafaat.

E. Hasil Penelitian

1. Peran dan Cara Pemerintah Desa Dalam Mensosialisasikan bantuan Langsung Tunai Program Pengelolaan BLT Pemerintah

Peran Pemerintah Desa Tanjung Telang dari hasil wawancara penulis dengan kepala Desa Tanjung Telang, Peran pemerintah Desa Tanjung Telang sebagai fasilitator, Administrator, instruktur, komunikator yang menjembatani masyarakat dalam penerimaan bantuan dari pemerintah salah satunya BLT (Bantuan Langsung Tunai). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan prioritas penggunaan DD (Dana Desa) untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Pemerintah Desa diwajibkan menganggarkan dan melaksanakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa. BLT Dana Desa adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat berupa uang tunai untuk masyarakat miskin atau tidak mampu di Desa dengan kriteria tertentu keluarga penerima manfaat yang disepakati bersama dan diputuskan melalui musyawarah Desa yang bersumber dari Dana Desa.

“Peran pemerintah di desa itu mencakup berbagai tugas yang harus dijalankan oleh pemerintahan desa, seperti menjadi fasilitator, administrator, instruktur, dan komunikator bagi masyarakat dalam mendapatkan bantuan salah satunya BLT (Bantuan Langsung Tunai)”

Berdasarkan hasil jawaban Bapak Yudiman selaku Kepala Desa Tanjung Telang beliau mengatakan bahwa peran pemerintah itu suatu tugas yang harus dijalankan oleh pemerintah yang mempunyai kedudukan terutama di desa. Biasanya dalam proses pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada

masyarakat, beliau sebagai kepala desa tentu juga sebagai fasilitator yang merupakan suatu proses yang dilakukan pemerintahan Desa untuk membantu masyarakat seperti memberikan bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada masyarakat ataupun pemerintahan Desa memfasilitasi masyarakat. Selain itu pemerintah desa juga berperan sebagai administrator yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi program-program dan sumber daya yang dimiliki desa. Selanjutnya sebagai instruktur, dimana pemerintah desa memiliki peran dalam memberikan arahan, panduan, dan pendampingan kepada Masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang ada. Yang terakhir sebagai komunikator, dimana pemerintah bertugas untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan menyampaikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan dan program yang ada.⁸⁰

Bapak Yudiman juga menjelaskan terkait masyarakat penerima BLT Dana Desa pada tahun 2023 tidak menerima kembali pada tahun 2024. Data itu kan akurat dari pemerintah Desa yang sekarang kan aturannya langsung dari pemerintahan pusat 20%, maka kita sistemnya dirubah, mana yang belum dapat sama sekali itu yang kita naikan kembali, tidak mesti dia sudah dapat kita naikan dia kembali, mungkin ada bantuan lain yang dia kena, seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

“Peran pemerintah desa sangat penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu contohnya adalah melalui program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang memberikan

⁸⁰ Yudiman, Kepala Desa Tanjung Telang, *Wawancara*. 22 Februari 2024

bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) ini melibatkan beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh aparatur desa sesuai dengan acuan-acuan yang telah ditetapkan''

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Tanjung Telang, bahwa Ibu Lesi sebagai Kaur Keuangan mengatakan bahwa, pemerintah desa berperan dalam mewujudkan kondisi yang kondusif untuk mewujudkan pembangunan untuk membantu kepentingan masyarakat, salah satunya dengan adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) pemerintah Desa memberikan wadah bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan. Pemerintah tentu berperan juga seperti yang dikatakan kepala Desa tadi bahwa pemerintahan desa memfasilitasi, berkomunikasi, dan administrasi Desa pun terjalin baik dengan masyarakat. Namun untuk mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai aparatur desa tentu memiliki acuan-acuan dalam pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) ini tidak serta merta langsung di berikan ada beberapa proses yang di lakukan.⁸¹

“Peran pemerintah desa dimulai dari perumusan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk satu periode di Desa Tanjung Telang. RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) berbentuk dokumen perencanaan yang menuntun ke arah tujuan pencapaian visi dan misi desa, mencakup evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, rencana kegiatan dan anggaran, prioritas program, dan tim pelaksana kegiatan”

Berdasarkan hasil jawaban Bapak Juaman selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Tanjung Telang mengatakan bahwa peran pemerintah desa dimulai dari perumusan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah

⁸¹ Lesi, Kaur Keuangan Desa Tanjung Telang, Wawancara. 22 Februari 2024

Desa) untuk satu priode yang dilakukan di Desa Tanjung Telang. RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) merupakan dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa. RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa paling sedikit berisi uraian mengenai evaluasi pelaksanaan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa tahun sebelumnya, rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan tim Pelaksana Kegiatan.⁸²

“Peran pemerintah desa dalam mensosialisasikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa kepada masyarakat penting untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Proses ini melibatkan komunikasi antara pemerintah desa, aparatur desa, dan masyarakat setelah proses administrasi dan fasilitasi telah selesai.”

Hasil jawaban dari Bapak Sobirin beliau berpendapat bahwa, peran pemerintah dalam mensosialisasikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) di masyarakat untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat berupa uang tunai untuk masyarakat miskin atau tidak mampu di Desa dengan kriteria tertentu keluarga penerima manfaat yang disepakati bersama dan diputuskan melalui musyawarah Desa yang bersumber dari Dana Desa dan juga pemerintahan desa melakukan komunikasi

⁸² Juaman, Ketua BPD Desa Tanjung Telang, *Wawancara*. 22 Februari 2024

bersama pemerintahan desa dan juga masyarakat untuk menyalurkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) ini lalu setelah di fasilitasi, administrasi sudah lengkap lalu dikomunikasikan dengan masyarakat mengenai BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang akan di salurkan.⁸³

“Proses pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat memang melalui tahapan yang melibatkan pemerintah Desa sebagai fasilitator bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Salah satu tahapan yang perlu dilakukan sebelum pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah Musrebang Desa, untuk mendaftar bantuan dapat mendownload aplikasi cek bansos di play store selanjutnya buat akun dengan mengisi data diri ”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hepriyanto beliau mengatakan adanya proses dalam pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada Masyarakat, sedangkan pemerintah desa sebagai fasilitator bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), yang perlu di lakukan sebelum pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada masyarakat yaitu dengan adanya Musrebang Desa (Musyawarah perencanaan pembangunan Desa) yang melibatkan seluruh perangkat dengan dan Masyarakat yang dapat bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Proses tersebut dilakukan dengan mengakses cara-cara untuk mendaftar bantuan tersebut yang mana biasanya pemerintahan desa mengakses atau mendaftarkan masyarakat secara online. Dengan cara *mendownload* aplikasi cek bansos di *Play Store*, setelah diunduh maka dapat membuat akun baru di aplikasi cek bansos, setelah instalasi selesai buka aplikasi dan pilih opsi “buat akun baru”.

⁸³ Sobirin, Kaur Umum Desa Tanjung Telang, *Wawancara*. 22 Februari 2024

Selanjutnya isi data-data yang diminta, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah itu unggah foto KTP dan swafoto diri ikuti petunjuk pada aplikasi untuk mengunggah foto KTP dan swafoto diri dengan KTP. Pastikan melakukannya dengan benar sesuai petunjuk yang diberikan. Klik “Buat Akun Baru”: Setelah mengisi data dan mengunggah foto, klik tombol “Buat Akun Baru” untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Daftar Usulan BLT BBM (Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak) Setelah berhasil membuat akun, klik opsi “Daftar Usulan” untuk memasukkan nama calon penerima BLT BBM (Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak). Tambah Usulan: Klik “Tambah Usulan” untuk mengisi data lengkap calon penerima BLT BBM (Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak) sesuai dengan informasi pada KTP (Kartu Tanda Penduduk). Tunggu Konfirmasi: Tunggu beberapa menit hingga data yang sudah diusulkan muncul dalam sistem. Dan juga sebagai masyarakat penting untuk selalu memperhatikan informasi resmi dari pemerintah terkait dengan program bantuan sosial ini. Masyarakat diharapkan untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan dan hanya menggunakan saluran resmi yang telah disediakan. Dengan begitu, kita dapat bersama-sama mendukung kelancaran dan keberhasilan program bantuan ini.⁸⁴

“Proses pemilihan penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dilakukan melalui Musyawarah Dusun (MusDus) di mana para kadus dan kepala dusun berkumpul untuk menyerap aspirasi warga serta mengidentifikasi penerima yang

⁸⁴ Hepriyanto, Sekretaris Desa Tanjung Telang, Wawancara. 22 Februari 2024

layak. Keputusan dibuat secara kolektif berdasarkan pengetahuan lokal dan kesepakatan bersama dalam musyawarah tersebut. Setelah itu, nama-nama yang akan menerima BLT direkapitulasi dan diajukan kepada Tim penyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk disusun dalam usulan prioritas pembangunan. Usulan tersebut kemudian dipertimbangkan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Pemerintah Desa untuk ditetapkan sebagai bahan masukan dalam forum Musrenbang Desa''

Sesuai dengan penuturan kadus 2 Bapak Harwan berpendapat bahwa: Mesdus wajib di lakukan sebelum pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Pada Masyarakat Karena setiap kadus didesa Tanjung Telang ini pasti tahu kondisi ekonomi masyarakatnya masing masing, beliau sebagai kadus hafal semua wajah, nama dan kondisi ekonomi masyarakat disini, tapi belum tentu hafal wajah dan nama masyarakat di dusun lain lainnya. Karena Musyawarah Dusun (MusDus) diadakan untuk menyerap aspirasi warga untuk wilayah tersebut. Tujuan dari MusDus tersebut ialah mengidentifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan dusun, yang mencakup bidang sosial budaya, ekonomi produktif warga dan sarana prasarana fisik lingkungan, dan mencari alternatif solusi atau pemecahan masalahnya. Jadi semua aspirasi warga bisa diserap dan hasil dalam musdus tersebut akan di rekap oleh Tim penyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan diajukan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Pemerintah Desa kemudian menetapkan usulan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan forum Musrenbang Desa nanti.⁸⁵

⁸⁵ Harwan , Kadus 2 Desa Tanjung Telang, *Wawancara*. 23 Februari 2024

Adapun syarat yang harus dipenuhi masyarakat sebagai penerima ini harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pertama calon penerima KPM (Kader Pembangunan Manusia) BLT (Bantuan Langsung Tunai) tidak tercatat sebagai penerima bantuan pemerintah, kedua harus ada usulan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten, ketiga harus ada konfirmasi dari pemerintah daerah untuk pengambilan, ke empat harus sesuai dengan kriteria KemenKeu, baru dibagikan ke masyarakat, ada tahapannya, untuk pengambilan dikasih kartu, dan diberikan ke masing masing kadus yang membidangi disemua dusun, dan kepala wilayah tersebut membagikan ke masyarakat setempat secara langsung.⁸⁶

Dengan adanya penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa cara pemerintah mensosialisasikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan cara Musrenbang (penetapan, sasaran, jumlah calon dan lain lain) calon, Musdus (mengoreksi kembali data data yang sudah ada), Musdesus (validasi, finalisasi penetapan calon KPM Kader Pembangunan Manusia) terakhir tahap penyaluran bantuan berupa uang tunai yang diterima langsung oleh masyarakat dan juga pemberian BLT sudah tepat sasaran dan sudah sesuai dengan PMK (Kader Pembangunan Manusia) No 109 Tahun 2021 Pasal 33 ayat 1 karena sudah melalui proses yang di sesuaikan dengan aturan pemerintah saat ini.

⁸⁶ Yudiman, Kepala Desa Tanjung Telang, *Wawancara*. 23 Februari 2024

2. Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tanjung Telang Kec Prabumulih Barat

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan suatu program pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan finansial secara langsung kepada individu atau kelompok tertentu dalam bentuk uang tunai. Program ini sering kali diluncurkan untuk membantu mereka yang membutuhkan dalam mengatasi kondisi ekonomi yang sulit atau dalam situasi darurat, seperti dalam menghadapi bencana alam, krisis ekonomi, atau pandemi. Bantuan langsung tunai dapat membantu meringankan beban finansial yang dihadapi oleh penerima, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, perumahan, atau kebutuhan medis. Selain itu, bantuan ini juga dapat memiliki dampak positif dalam merangsang konsumsi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Cik Mali selaku yang menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) di Desa Tanjung Telang menyatakan bahwa “dampak yang di rasakan masyarakat saat menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) ini memang membantu masyarakat miskin seperti kami. Tentu dari sisi keuangan masyarakat yang kurang mampu seperti kami sangat membantu perekonomian kami. Namun jika di nilai dengan kesejahteraan menurut saya kami masyarakat yang kurang mamapu ini belum sejahtera jika mengandalkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) saja dalam kehidupan sehari-hari. Terutama ketika harga barang di pasar naik. Saya ingat pada tahun 2023 lalu harga BBM naik

semua harga barang ikut naik dan di tahun ini pun juga bahan pokok pun kembali naik, tapi saya bersyukur pada saat ini saya mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk membantu keuangan keluarga saya yang kurang mampu ini”⁸⁷.

Hal diatas sejalan dengan pendapat Bapak Harun J berpendapat bahwa “Ketika ada pembagian Bantuan Langsung Tunai seperti tahun yang lalu, saya merasa terbantu. Berdampak pada perekonomian saya dan kelaurga dengan adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) ini bisa mengurangi beban ekonomi saat ini. Uang itu saya pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari di dapur namun kami merasa belum sejahtera apabila mengandalkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) saja dari pemerintah”⁸⁸.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nangasim Ditempat yang sama juga menuturkan “Saya memanfaatkan uang BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk membeli kebutuhan sehari-hari, karena jumlah uang itu tidak cukup kalau dijadikan modal usaha. Seandainya dicairkan sekaligus maka uang itu bisa dijadikan modal usaha, akan tetapi pencairannya setiap tiga bulan sekali.”⁸⁹

Dari penjelasan di atas bahwa BLT (Bantuan Langsung Tunai) belum efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin karena prioritas utama dari Bantuan Langsung Tunai tersebut masih untuk kebutuhan dasar. Namun, Bantuan

⁸⁷ Cik Mali, Masyarakat Penerimaan BLT Desa Tanjung Telang, *Wawancara*, 24 Februari 2024

⁸⁸ Harun J, Masyarakat Penerimaan BLT Desa Tanjung Telang, *Wawancara*, 24 Februari 2024

⁸⁹ Nangasim, Masyarakat Penerimaan BLT Desa Tanjung Telang, *Wawancara*, 24 Februari 2024

Langsung Tunai tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Jika pemerintah mau dan serius untuk membangun dan memperdayakan masyarakat desa maka pemerintah harus menjalankan atau menggalakan program pembangunan yang dipilih dan ditentukan oleh masyarakat secara bebas dan tentu ini akan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.

Jadi, jika dianalisa semua informasi yang di peroleh dari hasil wawancara terhadap informan bahwa penggunaan Bantuan Langsung Tunai memang dipakai untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Karena jumlahnya yang minim tidak memungkinkan dipakai untuk pengembangan usaha ataupun peningkatan kualitas hidup, pada dasarnya Bantuan Langsung Tunai memang program subsidi dari pemerintah yang bertujuan meringankan kesulitan masyarakat miskin.

Selain penulis mewawancarai masyarakat yang menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) penulis juga mewawancarai tokoh masyarakat yaitu Bapak H. Mustafa menurut beliau bahwa “Tokoh Masyarakat H. Mustafa: Program BLT memang bagus dan membantu masyarakat miskin terutama untuk kebutuhan pokok. Akan tetapi jika ditanya apakah BLT (Bantuan Langsung Tunai) berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentunya berdasarkan pada apa yang saya lihat sehari-hari tidak ada perubahan kualitas hidup apalagi peningkatan kesejahteraan. Ada dua orang tetangga saya yang mendapat BLT (Bantuan Langsung Tunai), tetapi kondisi hidup mereka tidak ada perubahan. Karena memang sulit bagi mereka memperbaiki nasib dengan bantuan dana yang

sangat minim. Malahan akan lebih baik kalau dana bantuan seperti itu diarahkan pada pembangunan lain, misalnya pembangunan infrastruktur. Dan lain sebagainya.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai, “mereka berpendapat bahwa: Uang BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar Rp.300.000 di berikan tiga bulan satu kali menjadi Rp 900.000 dengan setiap tiga bulan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan kami sebagai masyarakat miskin. Karena uang itu hanya cukup untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Itupun tidak cukup untuk satu bulan, apalagi bagi keluarga yang banyak tanggungnya. Jadi susah bagi kami untuk memperbaiki ekonomi dengan uang itu. Namaun BLT (Bantuan Langsung Tunai) ini membantu keuangan kani masyarakat yang kurang mamapu seperti kami tetapi untuk tingkat kesejahteraan kami belum berdampak.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Miyati “sama juga di katakan yang pernah memakai uang BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk tambahan modal Usaha BLT tidak bisa menghilangkan kemiskinan, apalagi mejadikan kami hidup sejahtera. Walaupun kami mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) tapi Kami tidak bisa dengan hanya mengandalkan uang BLT (Bantuan Langsung

⁹⁰ H. Mustafa, Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Telang, *Wawancara*. 24 Februari 2024

⁹¹ Nuryama, Masyarakat Penerima BLT Desa Tanjung Telang, *Wawancara*, 24 Februari 2024

Tunai) untuk membangun hidup. Uang BLT (Bantuan Langsung Tunai) hanya cukup membantu perekonomian sesaat saja.”⁹²

Pemerintah Desa setempat membenarkan hal tersebut Bapak Yudiman selaku kepala Desa Tnjung Telang menjelaskan dengan gamblang pandangannya mengenai program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Tidak benar kalau dikatakan bahwa BLT (Bantuan Langsung Tunai) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena memang tujuan pemerintah pusat memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah untuk membantu masyarakat miskin pada saat harga BBM naik. Bukan untuk meningkatkan kualitas hidup apalagi memberantas kemiskinan. BLT (Bantuan Langsung Tunai) itu kan program sementara. Pemerintah masih memiliki program jangka panjang untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin misalnya Program keluarga harapan (PKH) yang baru-baru ini dijalankan.⁹³

Dan juga BLT (Bantuan Langsung Tunai) berpengaruh terhadap semakin tumbuhnya budaya ketergantungan dari masyarakat, mengingat program ini menjadikan masyarakat bersifat pasif yakni menunggu atau menerima pemberian atau pembagian dari pemerintah. Bapak Yudiam Selaku Kepala Desa Tanjung Telang berpendapat bahwa: Itu sebenarnya jelas akan bertentangan dengan budaya. Karena ini akan menjadikan masyarakat tergantung pada pemerintah dan akhirnya tumbuh budaya malas bekerja. Apalagi agama mengajarkan tangan

⁹² Miyati, Masyarakat Penerimaan BLT Desa Tanjung Telang, *Wawancara*, 24 Februari 2024

⁹³ Yudiman, Kepala Desa Tanjung telang, *Wawancara*, 23 Februari 2024

diatas lebih baik daripada tangan dibawah. Artinya lebih baik memberi dari pada menerima atau menggantungkan hidup dari pemberian orang, walaupun dalam hal ini pemerintah punya niat baik.⁹⁴

Sedangkan tokoh masyarakat juga mengatakan Bapak H. Mustafa bahwa: Hal tersebut tidak sejalan dengan budaya bahkan agama. Apalagi Desa Tanjung Telang masyarakatnya muslim semua. Budaya Desa Tanjung Telang itu terkenal dengan kegigihannya dalam berjuang. Sekali layar tekembang pantang surut ke tepi. Ini bukan sekedar peribahasa tapi ini merupakan bentuk semangat perjuangan nenek moyang dulu dalam meraih nasib yang lebih baik. Lagi pula masyarakat Desa Tanjung Telang sebenarnya memiliki lahan persawahan yang luas. Tinggal kesungguhan mereka untuk mengelola, apalagi sawah sekarang sudah dialiri irigasi, beda dengan kondosi dulu.⁹⁵

Dari berbagai pandangan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa memang pada dasarnya BLT (Bantuan Langsung Tunai) dapat membantu masyarakat miskin, namun program ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, ataupun mensejahterakan masyarakat apalagi mengurangi angka kemiskinan, karena program ini adalah program jangka pendek dan sifatnya sementara. Program ini hanya dijalankan pada keadaan tertentu saja yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi dunia yang berimbas pada perekonomian nasional.

⁹⁴ Yudiman, Kepala Desa Tanjung telang, *Wawancara*, 23 Februari 2024

⁹⁵H. Mustafa, Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Telang, *Wawancara*. 24 Februari 2024

Program ini dapat dikatakan juga program yang bersifat insidental, artinya pada saat terjadi krisis baru program ini dijalankan.

F. Pembahasan

1. Peran pemerintah Desa Tanjung Telang mensosialisasikan bantuan langsung tunai adalah dengan menjadi fasilitator, administrator, instruktur dan juga komunikator bagi masyarakat.

Dari berbagai pandangan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa memang pada dasarnya BLT (Bantuan Langsung Tunai) dapat membantu masyarakat miskin, namun program ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, ataupun mensejahterakan masyarakat apalagi mengurangi angka kemiskinan, karena program ini adalah program jangka pendek dan sifatnya sementara. Program ini hanya dijalankan pada keadaan tertentu saja yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi dunia yang berimbas pada perekonomian nasional. Program ini dapat dikatakan juga program yang bersifat insidental, artinya pada saat terjadi krisis baru program ini dijalankan.

Fasilitator ini menyangkut masalah Desa yaitu orang-orang atau sebuah lembaga pemerintahan yang membantu dan memberikan fasilitas pada masyarakat. Jadi fasilitator adalah orang yang melakukan memfasilitasi yaitu membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi dalam suatu lembaga, fasilitator juga orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang sehingga mereka dapat memahami apa yang disampaikan oleh pemerintahan Desa.

Administrator merupakan keseluruhan proses kegiatan pencatatan dan juga informasi tentang pemerintahan desa baik itu menyangkut administrasi umum, kependudukan, keuangan Desa, pembangunan Desa dan juga tentu pemerintahan Desa tidak bisa di pisahkan dengan yang namanya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tentu administrasi Desa tidak bisa di pisahkan dari kerjasama antar pemerintahan Desa. Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tugas dan fungsi pemerintah, Selain menyelenggarakan pemerintahan desa seperti penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah.

Untuk proses pendataan yang dilakukan pada setiap penerima KPM (Kader Pembangunan Manusia) BLT (Bantuan Langsung Tunai) yakni bersama sama secara terbuka dengan melibatkan masyarakat untuk ikut partisipasi. Koordinasi dalam validasi data yang sudah ada pada pemerintah desa untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengusulan sehingga tidak adanya perbedaan bagi setiap keluarga yang berhak dalam memperoleh manfaat BLT (Bantuan Langsung Tunai). Proses pendataan KPM (Kader Pembangunan Manusia) bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat agar pemberian bantuan menjadi tepat sasaran sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat.

Penerima manfaat BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa yang layak sesuai dengan data data dari pemerintah desa melalui musyawarah yang dilakukan dari musrenbang sampai uang tunai yang diterima oleh masyarakat desa. Secara administrasi setiap penerima KPM (Kader Pembangunan Manusia) didesa dara kunci yang sudah menerima bantuan di lakukan foto sebagai bukti penerima sudah melakukan pengambilan bantuan. Jadi addministrator Desa ini adalah bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Tanjung Telang ini, yaitu apabila ada bantuan dari pemerintah pusat untuk masyarakat, aparat desa berupaya semaksimal mungkin menjadi wadah bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.

Instruktur Pemerintah Desa. Pemerintahan yang memberikan araham pada masyarakat tentang bagaimana pemberian bantuan-bantuan yang akan di terima masyarakat dengan di lakukanya kegiatan musdus, musdes dan juga di lanjutkan dengan mustembang desa. Tentu ada tahapan-tahapan dalam proses penetimaaan BLT (Kader Pembangunan Manusia) tersebut, Tahapan penyaluran merupakan kelanjutan dari pendataan yang sudah valid. Untuk Desa Tanjung Telang data-data sudah valid bagi yang sudah menerima bantuan sejak penetapan di musyawarah desa khusus dan penyaluran bantuan berbentuk uang tunai sebesar Rp. 300.000 dalam satu bulan dan di berikan di tiga bulan satu kali. Sedangkan data-data masyarakat yang tidak menerima bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai) akan tetap diusulkan oleh pemerintah desa dalam bentuk lain seperti PKH (Program Keluarga Harapan). Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam

mensosialisasikan bantuan langsung tunai. Merumuskan RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) desa untuk satu periode. Menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait bantuan yang mereka terima. Menentukan sasaran yang menjadi prioritas pemberian bantuan. Melaksanakan mekanisme sosialisasi BLT (Bantuan Langsung Tunai). Sebagai wadah yang menjembatani masyarakat ke pemerintah pusat. Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.

Untuk proses penyaluran bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dilaksanakan secara langsung dibalai desa dengan cara dipanggil satu persatu untuk maju mengambil bantuan yang akan diberikan. Komunikator, Sesuai dengan peran pemerintah disini peran komunikator pemerintah desa yaitu mencapai kesepahaman makna, dalam proses komunikasi yang baik di perlukan unsur unsur komunikator, pesan, efek atau respon dari komunikan. Pemerintah desa sudah memberikan proses komunikasi yang baik dan sesuai prosedur, berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam mensosialisasikan bantuan sosial ke masyarakat, Dalam hal ini, pada saat pelaksanaan musrenbang desa di Tanjung Telangasaran yang ingin dicapai adalah kelengkapan informasi yang disampaikan kepada masyarakat terutama permasalahan yang dihadapi desa. Musrenbangdes untuk menentukan prioritas penggunaan dana desa dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa). Penggunaan dana desa sebagian nya dari anggaran dana desa akan digunakan untuk bantuan ke masyarakat.

Pemerintah desa memberikan pernyataan bahwa sudah memberikan informasi mengenai anggaran dana desa untuk bantuan sosial ke masyarakat melalui musyawarah bersama mengenai RKP (Rencana Kerja Pemerintah) desa yang telah disepakati. Untuk menertibkan penerima dalam memperoleh bantuan juga sudah disampaikan oleh pemerintah desa jadwal pembagian berdasarkan keputusan pemerintah daerah.

Dari hal pembahasan yang sudah dipaparkan mengenai peran pemerintah desa dalam mensosialisasikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa dimasyarakat dapat di simpulkan bahwa. Peran Pemerintah desa dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau status dalam struktur sosial di masyarakat dari perumusan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) terkait BLT (Bantuan Langsung Tunai). Administrasi pendataan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa memberikan kejelasan mengenai jumlah bantuan yang diberikan menjadi tepat sasaran. Penetapan nama dan memverifikasi calon penerima ditentukan sesuai PP (Peraturan Pemerintah) yang telah di arahkan pemerintah pusat ditetapkan bersama pada saat musrenbang desa. Menetapkan mekanisme mekanisme penyaluran bantuan dalam rangka tanggung jawab atas fungsi dan tugas pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat. Sehingga bantuan tersebut sampe ke tangan masyarakat berupa uang tunai. Tak hanya itu pemerintah desa memberikan penjelasan kepada masyarakat yang tidak menerima, berupa penjelasan mengenai dana desa tidak mencukupi, masyarakat pasti mendapatkan bantuan tapi berbentuk

lain, penjelasan seperti itu disampaikan oleh Pemerintah desa saat Musrenbangdes. Arahan yang disampaikan ke masyarakat dapat memberikan pemahaman dan pengertian sehingga tidak adanya konflik yang terjadi terkait bantuan. Maka dalam konsep lain peranan tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan tugas dan wewenang pemerintah Desa Tanjung Telang sebagai struktur sosial tertinggi di masyarakat dalam sosialisasi penyaluran terkait proses belajar peran, status dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam sebuah kelompok.

Sedangkan cara pemerintah Desa Tanjung Telang Dalam Mensosialisasi BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada masyarakat bahwa. Sesuai dengan Musrambangdes yang sudah disepakati bersama dengan lembaga yang terlibat, Pemerintah desa berupaya menyusun mekanisme sosialisasi ke masyarakat, melakukan berbagai macam persiapan untuk menentukan kriteria calon penerima KPM tersebut. Pemerintah desa melakukan berbagai tahapan sebelum BLT (Bantuan langsung Tunai) sampai ke tangan masyarakat mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa hingga sampe ke tahap penyaluran KPM (Kader Pembangunan Manusia) BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa.

a. Musyawarah Dusun (MusDus)

Musdus dilakukan oleh seluruh kepala dusun yang ada di Desa Tanjung Telang. Diadakannya musdus untuk merealisasi para penerima KPM (Kader Pembangunan Manusi) sesuai dengan arahan kepala desa saat Musrenbangdes.

Kepala desa lebih menekankan ke masing-masing dusun dikarenakan lebih paham dan tahu kondisi sosial ekonomi masyarakat disetiap dusun yang mereka pimpin

Tujuan dari MusDus ialah. Mengidentifikasi data data masyarakat calon penerima KPM (Kader Pembangunan Manusia) BLT (Bantuan LANGSUNG Tunai) dilihat dari segi ekonomi. Memeriksa tidak adanya data yang ganda nama calon penerima terdapat dibantuan lain. Melakukan realisasi terkait penerima KPM (Kader Pembangunan Manusi) BLT (Bantuan Langsung Tunai) tahun lalu, apakah layak kembali menerima atau tidak

Musyawarah dilakukan secara bersama sama dengan RT (Rukun Tetangga) masing masing dusun. Setelah mengatongi nama nama calon penerima KPM (Kader Pembangunan Manusia) setiap kepala dusun maka hasil MusDus akan dibawa ke Musdesus. Para kepala dusun Desa Tanjung Telang tak hanya Satu kali mereka melakukan musdus, setiap melakukan musdus maka hasilnya akan dikoreksi bersama di kantor desa. Apabila sudah dirasa data calon penerima KPM (Kader Pembangunan Manusia) benar benar valid sesuai dengan keadaan mereka maka pihak pemerintah desa akan segera melaksanakan Musdesus. Hal tersebut sesuai dengan konsep peranan yang dilakukan oleh setiap kadus sesuai arahan dari kepala desa pada saat musrenbang desa yaitu melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukannya dengan konsep peranan yang dilakukan oleh setiap kadus sesuai arahan dari kepala desa pada saat musrenbang desa yaitu melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukannya.

b. Musyawarah Desa Khusus

Dalam Musdesus di dijelaskan terkait mekanisme prosedur pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa akan dilakukan balai atau kantor kepala Desa. Masyarakat yang menerima KPM (Kader Pembangunan Manusia) BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa akan di antarkan langsung berbentuk surat kartu KPM (Kader Pembangunan Manusia) dengan cara mengunjungi rumah-rumah warga penerima Dana Desa. Dari hasil Mudesus telah ditetapkan dan disahkan sebanyak 70 Kartu Keluarga penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa setiap Kartu Keluarga akan menerima uang dari anggaran dana desa berupa uang tunai sebesar RP. 300.000 setiap bulannya jumlahnya Rp 900.000 dan di berikan dalam jangka tiga bulan satu kali dalam jangka waktu sesuai dengan apa yang telah dirumuskan sebelumnya di Musrenbangdes.

c. Pelaksanaan penyaluran

Setelah disepakati bersama hasil Musdesus yang dilakukan oleh pemerintah desa maka tahap selanjutnya pelaksanaan. Dalam hal pelaksanaan penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa pemerintah beberapa tahapan lagi yang harus dilakukan yakni. Pembagian kartu KPM (Kader Pembangunan Manusia). Sosialisasi BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa. Respon masyarakat Adapun cara Pemerintah desa dalam mensosialisasikan bantuan langsung tunai dana desa di masyarakat dimulai dari kedudukannya yang dimiliki sehingga bisa menjalankan peranannya meliputi hak dan kewajiban sebagai struktur organisasi pemerintahan dalam masyarakat. terlihat dari penyusunan, pelaksanaan, penentuan, hingga respon yang ditimbulkan akibat dari hal-hal yang dilakukan.

Sedangkan yang kita ketahui tentang peran secara umum diartikan sebagai status atau kedudukan, sedangkan peranan diartikan sebagai tugas atau kewajiban seseorang dalam sebuah jabatan.

2. Dampak bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dari hasil yang telah didapatkan bersama informan bahwasanya bantuan langsung tunai ini merupakan bantuan yang bersumber dari dana desa. Pada masa pandemi covid-19 munculah bantuan ini yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria ataupun syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari hasil penelitian bahwasanya bantuan langsung tunai ini didapatkan oleh masyarakat cukup beragam, ada yang mendapatkannya selama tiga tahun berturut turut, dua tahun berturut turut dan terdapat juga masyarakat yang menerimanya hanya satu tahun saja.

Akan tetapi disini masyarakat yang menerima tersebut telah diseleksi terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Terkait dengan pembagian bantuan langsung tunai ini kepada masyarakat sudah cukup baik, dalam waktu satu bulan pembagian setiap bulannya tidak ada yang terlambat untuk disalurkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang membutuhkan uang tersebut untuk keperluan mereka dapat digunakan setiap bulannya. Dengan adanya bantuan langsung tunai ini walaupun jumlah yang diberikan tidak terlalu besar akan tetapi masyarakat yang menerimanya sangat antusias terhadap adanya bantuan langsung tunai ini. Masyarakat yang menerima bantuan ini tentunya menggunakan uang

tersebut untuk kebutuhan hidup mereka sehari hari, mulai dari beras, gula, minyak, token rumah dan keperluan lainnya. Dari berbagai masyarakat yang menerima bantuan tersebut terdapat juga mereka yang mendapatkan uang bantuan itu digunakan untuk menabung.

Adapun bagi masyarakat yang menerima bantuan, walaupun dengan nominal tidak terlalu besar akan tetapi dari hasil yang didapatkan terhadap informan yang diwawancarai bahwasanya bantuan ini sangat membantu mereka dan sangat bermanfaat untuk kehidupan yang dijalani walaupun tidak dapat membantu sepenuhnya ataupun tidak dapat mensejahterakan keluarga mereka. Masyarakat menggunakan uang bantuan itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Bantuan langsung tunai ini diberikan kepada masyarakat dengan kriteria yang telah ditetapkan, pada desa Resun Pesisir masyarakat yang menerima bantuan ini semuanya termasuk dalam kriteria yang telah ditetapkan, tidak ada kecurangan bantu membantu yang bukan hak milik mereka, tidak ada sistem kekeluargaan walaupun ada saudaranya yang kerja di kantor Desa, semuanya murni dari hasil seleksi ataupun berdasarkan kriteria yang ada.

3. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat

Dalam perspektif ekonomi Islam kesejahteraan masyarakat diukur bukan hanya dari segi kekayaan materi, tetapi dari segi kesejahteraan sosial, mental, karena Islam menekankan keadilan. Tinjauan ekonomi Islam ini dapat dilihat dari sisi pendistribusiannya. Dari sudut pandang ekonomi dan sosial, pendistribusian

BLT bisa dilihat sebagai salah satu bentuk pendistribusi kekayaan atau pendistribusian harta. Hal ini karena program tersebut mengalihkan sebagian kekayaan negara (melalui anggaran pemerintah) kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu atau terdampak secara ekonomi. kepada masyarakat yang menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai). Bahwa tinjauan ini melibatkan pemahaman pemerintahan Desa terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, keberpihakan kepada yang lemah seperti halnya kepada yang tidak mampu di Desa, pendistribusian yang adil ini bisa di lihat siapa saja yang bisa menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan siapa saja yang tidak bisa menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Pendistribusian BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam haruslah memperhatikan beberapa hal seperti, pendistribusian BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada masyarakat harus didasarkan pada prinsip keadilan, dimana bantuan tersebut di berikan kepada yang membutuhkan tanpa memandang agama ataupun status sosial, dan bantuan yang di berikan pemerintah ini harus bersifat transparan pada masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan seperti halnya korupsi dana BLT (Bantuan Langsung Tunai), penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) seharusnya diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri mereka secara ekonomi, misalnya pemerintahan Desa membuat pelatihan keterampilan pada masyarakat salah satunya pelatihan kewirausahaan sehingga masyarakat dapat mandiri di masa depan dan tidak ketergantungan dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Lalu

seharusnya pemerintahan Desa melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang akan di ambil pemerintahan Desaterutama dalam hal bantuan-bantuan pada masyarakat.

BLT (Bantuan Lngsung Tunai) pada masyarakat Desa tanjung telang ini tentu sudah adil karena yang mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah memang benar-benar masyarakat yang tidak mampu, karena sudah melalui proses pemilihan sesuai dengan kriteria sehingga menghasilkan 70 KK (Kartu Keluarga) yang menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan juga sudah di sepakati pemerintahan beserta masyarakat di Desa Tanjung Telang.

Dalam perspektif ekonomi Islam, program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dapat di lihat sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial dan upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang mampu dan tidak mampu dan juga sebagai konsep zakat dalam Islam juga menekankan penyingnya memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Namun ada beberapa pertimbangan yang perlu di perhatikan dalam program BLT (Bantuan Langsung Tunai) dalam hubungan ekonomi Islam, program tersebut harus di jalankan dengan tansparan dan adil, mengikuti prinsip distribusi bantuan, BLT (Bantuan Langsung Tunai) seharusnya tidak dijadikan sebagai ketergantungan jangka panjang, tetapi sebagai upaya untuk memberdayakan penerima bantuan agar dapan mandiri secara ekomoni, program BLT (Bantuan Langsung Tunai) harus diintegrasikan dengan kebaikan lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja agar dapat memberikan

dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi penerima jika di lihat dari ekonomi Islam namun sekarang berbanding terbalik dengan ekonomi Islam.

Pendistribusian BLT (Bantuan Langsung Tunai) ini harus dilakukan secara cermat terhadap masyarakat yang menerima, berdasarkan kriteria yang jelas hal ini bisa di lakukan dengan cara survei atau data yang tersedia dari lembaga pemerintahan atau organisasi yang terkait.

Tentu pemerintah harus memastikan pendistribusian BLT (Bantuan Langsung Tunai) di lakukan secara transparan pada masyarakat dan memberi informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme seleksi dan bagaimana mereka bisa mengajukan keluhan jika merasa tidak adil dalam proses penerimaan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Berikan informasi yang jelas terkait BLT (Bantuan Langsung Tunai) tersebut yang mudah di pahami masyarakat mengenai pendistribusian BLT (Bantuan Langsung Tunai) serta hak dan kewajiban bagi mereka yang menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai). Dengan melakukan hal tersebut pendistribusian dapat di lakukan dengan baik dan benar, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pandangan Islam, berdasarkan prinsip dari *maqashid* syariah yang menjadi tujuan utama dalam ekonomi syariah yaitu guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), untuk menguji apakah BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) sudah sesuai apa tidak dengan prinsip Islam, maka diperlukan perbandingan antara *maqashid* syariah dengan realita yang terjadi di lapangan.

Lima *maqashid* syariah yang akan menjadi perbandingan dengan dana BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) adalah sebagai berikut:

a. *Ad-dien*

Ad-dien merupakan salah satu *maqashid* syariah yang berarti Melindungi dan menjaga agama merupakan tujuan dari syariat Islam yang dilakukan dengan melaksanakan kewajiban keagamaan, penjagaan terhadap agama yang menekankan kepada telah terlaksanakannya rukun islam yang lima yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Berdasarkan data yang didapatkan dari informan adanya dana BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) tidak terlalu berpengaruh terhadap *maqashid* syariah yang pertama yaitu *hifdzuddien* dikarenakan ada atau tidak adanya dana desa untuk masyarakat Desa tetap dapat memenuhi *maqashid* syariah *hifdzud-dien*.

b. *An-Nafs*

An-Nafs merupakan *maqashid* syariah yang berarti penjagaan terhadap jiwa dan raga. Dengan adanya BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) untuk masyarakat Desa Tanjung Telang dapat memenuhi kebutuhan pangan nya sehingga mencegah terjadinya kondisi yang mengancam seperti kelaparan yang akan berakibat fatal pada kesehatan masyarakat itu sendiri. Nurmala (penerima manfaat) menuturkan “Alhamdulillah dengan adanya bantuan tunai sebesar Rp 900.000 per tiga bulan yang diberikan oleh pemerintah, dapat saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan makanan sehari-hari. Selain itu juga saya gunakan untuk keperluan pengobatan rawat jalan penyakit yang saya alami saat ini, dengan

adanya bantuan ini setidaknya dapat menjadi jalan keluar bagi saya dalam menghadapi kesulitan dan membantu perekonomian, alhamdulillah dengan adanya bantuan ini saya senang dan tertolong. Dengan adanya BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) memberikan dampak positif pada ekonomi dan sosial masyarakat dikarenakan mereka dapat mencukupi kebutuhan pokok sehingga dalam menjaga jiwa manusia berarti menjaga hak untuk hidup secara baik, terhormat, dan termotivasi untuk selalu berikhtiar atau usaha.

c. Al-Aql

Al-aql merupakan bagian dari maqashid syariah yang berarti penjagaan terhadap akal pikiran. BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana desa berpengaruh terhadap *hifdzul-aql*. Dikarenakan BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) dapat membuat seseorang mengonsumsi makanan yang layak sehingga terhindar dari berbagai makanan yang dapat menyebabkan seseorang terganggu pikirannya, sebab saya secara pribadi memang sudah tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap, palingan hanya pergi ke sawah apabila ada yang membutuhkan, dengan adanya BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai) ini, sangat membantu dalam meringankan beban saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk beli ikan walaupun tidak selalu. Nursema (penerima manfaat) menuturkan sedangkan untuk saat ini anak saya yang bekerja sedang kesulitan juga, oleh karena itu syukurlah ada sedikit bantuan BLTDD (Bantuan Langsung Tunai) ini dapat saya pergunakan untuk kebutuhan dapur dan juga untuk membeli paket internet buat anak saya yang masih SMP (Sekolah Menengah Pertama).

d. An-nasb

An-nasb merupakan *maqashid* syariah yang berarti penjagaan terhadap keturunan. Dalam hal ini BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai) berpengaruh pada indikator *hifdzun-nasb* yaitu pada kewajiban seorang kepala keluarga dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarganya karena keturunan akan menjadi penerus dalam kehidupan. Dengan begitu kepala keluarga merasa terbantu dalam mencukupi kebutuhan pokok untuk kelangsungan keturunannya. Hal ini selaras dengan penuturan bapak Cik Mali yang menuturkan “dengan adanya bantuan ini saya terbantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya minimal untuk keperluan anak dan jajan mereka, walaupun jumlahnya sedikit namun saya bersyukur.

e. Al-maal

Merupakan *maqashid* syariah yang berarti penjagaan terhadap harta. Dengan adanya BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai) , masyarakat desa dapat memenuhi penjagaan terhadap harta kerana dengan adanya dana tersebut masyarakat tidak melakukan tindakan merugikan orang lain seperti pencurian harta, dan lain-lain. Bapak Sobirin (aparatur desa) menuturkan “sejauh ini dengan adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) ini dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan materil seperti keadaan masyarakat yg terpaksa menjual hartabenda untuk memenuhi kebutuhannya dan juga hal-hal yang dapat merugikan orang lain”. Dari hasil wawancara peneliti dengan para perangkat desa dan penerima bantuan, hampir semuanya menyatakan bahwa dana.

BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) sangat bermanfaat bagi masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat Dengan adanya BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) masyarakat miskin dapat tertolong dan bertahan terhadap

kehidupan ekonominya dan sosial masyarakat dapat terjaga pada masa kenaikan harga bahan pokok. Hal itu ditandai dengan pengakuan masyarakat yang menyatakan bahwa BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang disebutkan dalam *maqasid* syariah yaitu terpenuhinya *hifdzul mall* atau penjagaan terhadap harta yang mana dengan adanya bantuan tersebut dapat mencegah tindakan yang dapat merugikan materi KPM dan orang lain. Kemudian juga dengan adanya bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai) ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dan sandang nya. dengan adanya BLTDD (Bantuan Lngsung Tunai Dana Desa) untuk masyarakat juga dapat memenuhi *hifdzun-nasb* atau penjagaan keturunan. Serta dengan adanya BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) untuk masyarakat dapat memenuhi maqashid syariah bagian *hifdzulaql* atau penjagaan terhadap jiwa raga karena dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemerintah desa sebagai fasilitator, administrator, instruktur dan komunikator. Peran sebagai fasilitator ini memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Peran administrator ini administrasi masyarakat yang lengkap. Instruktur memberikan arahan di masyarakat. Komunikator, berkomunikasi dengan sesama aparatur pemerintahan dan juga masyarakat. Peran pemerintah desa dalam pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) merupakan tugas pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat. Sedangkan cara sosialisasi KPM (Kader Pembangunan Manusia) BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa dimulai Musrenbang (penetapan, sasaran, jumlah calon dan lain lain) calon, Musdus (mengoreksi kembali data data yang sudah ada), Musdesus (validasi, finalisasi penetapan calon Kader Pembangunan Manusia) terakhir tahap penyaluran bantuan berupa uang tunai yang diterima langsung oleh masyarakat.
2. Berdampak pada perekonomian masyarakat yang tidak mampu, tentu sangat membantu perekonomian masyarakat. Dimata masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bahwa uang BLT dinilai hanya sebagai uang pembeli sembako, namun penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) belum bisa sejahtera dengan hanya mengandalkan BLT (Bantuan

Langsung Tunai), baik tokoh masyarakat maupun pemerintah desa sama-sama memiliki pandangan bahwa pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) menjadikan masyarakat bersikap pasif, karena hanya menunggu pemberian dari pemerintah. Dengan alasan di atas tokoh masyarakat maupun pemerintah desa sepakat mengatakan bahwa sebenarnya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kurang sejalan dengan semangat budaya dan bahkan agama. Baik tokoh masyarakat maupun pemerintah desa menilai bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat membantu masyarakat namun BLT dinilai tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

3. Perspektif Ekonomi Islam terhadap program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Islam menganjurkan untuk memberikan bantuan untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi dan juga tanggung jawab pemerintah untuk kesejahteraan masyarakatnya dan juga dapat di lihat dari sisi pendistribusian BLT (Bantuan Langsung Tunai). Dari sudut pandang ekonomi dan sosial BLT (Bantuan Langsung Tunai) bisa dilihat sebagai salah satu bentuk pendistribusi kekayaan atau pendistribusian harta, hal ini karena program tersebut mengalihkan sebagian kekayaan negara (melalui anggaran pemerintah) kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu atau terdampak secara ekonomi. Dalam pandangan islam, berdasarkan prinsip dari maqashid syariah yang menjadi tujuan utama dalam ekonomi syariah yaitu guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), untuk menguji apakah BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah

sesuai apa tidak dengan prinsip Islam, maka diperlukan perbandingan antara maqashid syariah dengan realita yang terjadi di lapangan. Lima maqashid syariah yang akan menjadi perbandingan dengan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah sebagai berikut: *Ad-dien, An-Nafs, Al-Aql, An-nasb* dan *Al-maal*.

B. Saran

1. Diperlukanya penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih lanjut dan mendalam mengenai cara cara pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya serta kinerja pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial ke masyarakat terutama BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa. Penelitian ini juga belum sampai ke efektifitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa mengenai data dan informasi, apakah masyarakat paham mengenai bantuan yang mereka terima.
2. Pemerintah daerah diharapkan melihat langsung penyaluran KPM (Kader Pembangunan Manusia) agar bisa lebih optimal serta kondisi ekonomi dan harus memprioritaskan masyarakat yang lolos kriteria calon penerima manfaat BLT (Bantuan Langsung Tunai).
3. Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa harus dilakukan secara efektif untuk mencapai target agar memeperkuat ekonomi masyarakat, terutama masyarakat miskin.
4. Bagi masyarakat perlu mengantisipasi dan meningkatkan kesadaran sosial bersama apabila dirasa bisa memenuhi kebutuhan ekonomi sehari hari,

penulis berharap agar masyarakat khususnya bisa saling berbagi dan memberikan bantuan walaup ke orang lain yang lebih membutuhkan. Serta apabila ada masyarakat mendapatkan bantuan dan membeli sembako, jika ada rezeki lebih bisa berbagi kebutuhan ke masyarakat sekitar atau tetangga terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia (2021): 130
- Abidin Basri, Ikhwan. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press (2021): 24
- Amiruddin. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Makassar: Alauddin University Press (2014):27
- Arikunto, Suharsimi. *Penilaian Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bina Aksara (2018): 1-2
- Abbas, Anwar. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Rosdakarya (2022): 166
- Ahmad Saebani, Beni. *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV Pustaka Setia (2016): 137
- Akib Risfaisal, Irwan. *Bantuan Langsung Tunai*, *Equilibrium Jurnal Pendidikan* Vol. 3:2 (2015): 89-90
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta (2002): 134
- Bintarto. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Bogor: Ghalia Indonesia (2015): 94
- Diana, Ayu. *Evaluasi Program Pendidikan, Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII), Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiah Indralaya*. P-ISSN: 2987-8977| E-ISSN: 2987-8985 Vol. 1 No. 1 (2023): 157-166
- Daryanto. *Kamus Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo (2018): 348
- Danim, Sudarman. *Trasnformsi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara (2018): 7
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka (2016): 1051
- Djatimurti Rita Hanafie Sri Raharju. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: CV Andi Offset (2016): 83-84
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Toha Putra (1971): 46
- Faizah, Nadjematul. *Pengelolaan Siswa Pada Sekolah Berbasis Agama Islam*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* P-ISSN: 2614-4018 Doi: 10.30868/im.v4i02.4612 E-ISSN: 2614-8846. Diakses 17 Desember (2023): 2614-8846
- Gunawan. *Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara (2013): 163
- Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Dan Konsep Implementasi*. Bandung: Alfabeta (2012): 198
- Hasibuan Malayu S. *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara (2014): 1
- <https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-188/#tafsir-quraish-shihab>. Diakses 18 Desember 2023

- HR. Ibnu Majah no. 2341, Thabrani dalam Al Kabir no. 11806, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani –rahimahullah– dalam Shahih Al Jami’ no. 7517.
- Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari P-ISSN : 2460-9595. E-ISSN : 2686-5149. (2021):
- Kementerian lingkungan hidup, asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *menulis referensi dari internet*, 17 November 2017 <http://www.menlh.go.id/asas-perlidungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup> (2017): 46
- Kurniawan, Luthfi J. 2017. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing (2017): 11
- Lincoln. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publication (2021): 114
- Laras Wati, Dessy. *Peranan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Pada Perkonomian Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*. Riau: Skripsi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau (2021): 34-36
- Muhaimin. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana (2021): 349
- Mudasir. *Desain Pembelajaran*. Indragiri Hulu: STAI Nurul Falah (2017): 1
- M. Manulang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesi (2001):15-17
- Martoyo, Susilo. *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: BPFE (2016): 89
- Mannan, M. Abd. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa (2018): 19
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafind Persada (2010): 13-15
- Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah, Juz 2, CD. *Maktabah Kutubil Mutun*, Seri 4, (2019): 743
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya (2006): 23
- Maspawati. *Pengaruh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng*. Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Vol 4 No. 2 Juli 2023 e-ISSN: 2828-6340; p-ISSN: 2828-6359 (2023): 82-96
- Main, C.E. *Efektivitas Bantuan langsung tunai Dana Desa bagi Masyarakat miskin terkena Covid-19*. Jurnal Politico (2023): 44
- Nufian. *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Malang: UB Press (2018): 49
- Nawawi, Hadari. *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*. Jakarta: PT. Tema Baru (1989): 129

- Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta (2000): 887
- Rozalina. *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (2014): 2
- Rohman, Abdur. *Ekonomi Al-Ghazali*. Surabaya: PT. Bina Ilmu (2010): 60
- Syafri, Sofyan. *Manajemen Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (2021): 282
- Sanusi, Anwar. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)*. Jakarta: Sekretariat Kementrian PPN/Bappenas Republik Indonesia (2010): 6
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama (2010): 2-3
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group (2015): 59
- Sugiyono. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung, CV Alfabeta (2016): 147
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta (2017): 137
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada (197): 66
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta (2006): 310
- Suparman, Suparman. *Efektifitas Penyaluran BLT DD Bagi Masyarakat Miskin Terdampak covid 12*. Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 2 (2021): 22
- Tisnawati Sule, Erni. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Goup (2015): 6
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara Yusuf Tayipnapi, Farida. 2018. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Rineka (2018): 85-89
- Yunia Fauzia, Ika. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana (2021): 7
- Yuliani. *Konsep Strategi ekonomis Syariah Terhadap Isu Kemsikinan*, Jurnal. Tulung Agung: STKIP PGRI Tulung Agung (2021): 137
- Yusuf Tayipnapi, Farida. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Rineka Cipta (2018): 9

LAMPIRAN

LAMPIRAN 01 PEDOMAN WAWANCARA

Dalam usulan penelitian ini peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat melakukan proses wawancara terhadap informan sehingga diharapkan memperoleh informasi yang lengkap, aktual dan akurat. Adapun beberapa pedoman pertanyaan dalam wawancara itu adalah sebagai berikut.

NO	PERTANYAAN	INFORMAN
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Apa yang bapak ketahui mengenai peran pemerintahan Desa dalam mensosialisasikan BLT? b. Apa yang bapak ketahui mengenai fasilitator, administrator, instruktur, dan juga komunikator? c. Apakah bapak selaku kepala Desa memberikan arahan atau himbauan pada masyarakat yang menerima BLT dan di BLT di gunakan untuk apa saja yang bapak ketahui? d. Apakah menurut bapak ada peran lain dari pemerintahan Desa? e. Apakah penerima BLT pada tahun lalu menerima kembali pada tahun ini? f. Bagaimana penyelenggaraan musrembangdes? g. Bagaimana cara pemerintah desa mensosialisasikan BLT? h. Apa saja syarat yang harus di penuhi masyarakat saat menerima BLT? i. Berapa jumlah KK penerima BLT? j. Apakah BLT menjadikan masyarakat memiliki budaya ketergantungan? 	Kepala Desa
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Apa peran pemerintah Desa dalam mensosialisasikan BLT pada masarakat? b. Berapa jumlah BLT yang di terima masyarakat? 	Kaur Keuangan
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Acuan apa yang digunakan pemerintah Desa dalam mensosialisasikan BLT? b. Berapa jumlah penerima BLT? 	Ketua BPD
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Apa peran pemerintah dalam mensosialisasikan BLT? 	Kaur Umum
5	<ul style="list-style-type: none"> a. Apa saja proses sosialisasi BLT sebelum di berikan pada masyarakat? b. Apa yang dimasud musrembangdes? 	Sekretaris Desa

	<ul style="list-style-type: none"> c. Siapa saja yang hadir saat musrembangdes? d. Apakah penyeluran atau pembagian BLT sudah tepat sasaran? 	
6	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan BLT setelah dilakukan musdus dan musdesus? 	Kasi Pelayanan
7	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah BLT bisa mensejahterakan masyarakat? b. Bagaimana pandangan bapak terkait BLT? 	Tokoh Masyarakat
8	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengapa Musdus wajib dilakukan sebelum pemberian BLT? 	Kadus
9	<ul style="list-style-type: none"> a. Apa dampak yang dirasakan saat menerima BLT dan dilihat dari sisi apa? b. Apakah bapak terbantu dengan adanya BLT dari pemerintah dan apakah dampak yang bapak rasakan dengan adanya BLT? c. BLT yang di berikan pemerintah digunakan untukn apa? d. Apakah dengan menerima BLT keluarga akan sejahtera? e. Apakah BLT bisa mensejahterakan masyarakat? 	Penerima BLT

LAMPIRAN 02 DOKUMENTASI WAWANCARA













KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-961/Un.09/VII.1/PP.00.9/12/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang perlu menunjuk dosen pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir yang dituangkan dalam keputusan Dekan;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggung jawab di tunjuk sebagai pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjukan nama-nama di bawah ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir:

1. **Dr. Listiawati, M.H.I.**
2. **Siti Mardiah, S.H.I., M.Sh.**

Terhadap Mahasiswa:

Nama : **Maya Sapitri**
NIM : 2030602190
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Pengelolaan Program (BLT) Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam Di Desa Tanjung Telang Kec. Prabumulih Barat

- KEDUA : Masa penulisan Skripsi dan Tugas Akhir adalah 6 (enam) bulan terhitung tanggal SK ini dikeluarkan, apabila dalam satu semester mahasiswa yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan maka judul Skripsi dan Tugas Akhir tersebut dianggap hangus dan diganti judul yang lain.
- KETIGA : Kepada Dosen Pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir tersebut agar menyediakan waktu untuk konsultasi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 07 Desember 2023
Dekan

Heri Anaidi

- Tembusan:
1. Prodi
 2. Mahasiswa
 3. Arsip



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Jln. Pangeran Ratu (Jakabaring), Kelurahan 5 ulu, Kecamatan Seberang ulu
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267 Telp 0711-354668

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Maya Sapitri
Nim : 2030602190
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Dr.Listiawati.MHI
Judul Skripsi : Pengelolaan Program (BLT) Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam Di Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	1 Nov '23	Latar belakang masalah di - Perhatikan lagi	
2	2 Desem '23	Tulisan Bahasa arab di Perbaiki	
3	16 Jan '24	- Penelitian terdahulu di beri tabel - latar belakang jangan menggunakan kata alasan penelitian	
4	20/1/2024	- Tuisan Bab III di ubah - kata tafsir arat di perhatikan / di ganti - yg di asos dari internet letakan di Darsus Paung belakang.	
5	29/1/2024	- Pakai rentas A4 A3	
6	29/3/2024	Ace keseluruhan dan di poe banyak untuk di uraikan	



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Jln. Pangeran Ratu (Jakabaring), Kelurahan 5 ulu, Kecamatan Seberang ulu
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267 Telp 0711-354668

No	Hari/Tanggal	Masalah Yang Dikonsultasi	Paraf
5	11 Maret 24	Revisi dan pembahasan	y
6	19 Maret 24	Penulisan ^{Carz} dan pembahasan	y
7	21 Maret 24	ACC bab IV-8	y
8	26 Maret 24	ACC keseluruhan bab	y



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Jln. Pangeran Ratu (Jakabaring), Kelurahan 5 ulu, Kecamatan Seberang ulu
Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30267 Telp 0711-354668

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Maya Sapitri
Nim : 2030602190
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Pembimbing II : Siti Mardiah,SHI,MsH
Judul Skripsi : Pengelolaan Program (BLT) Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam Di Desa Tanjung Telang Kec.Prabumulih Barat

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	19 Des '23	- Perbaiki latar belakang - Perbaiki LR - Tambah teori pengelola	y.
2	19 Des '23	- Pake referensi ttg kesejahteraan bukunya. - Buat kesimpulan Penelitian terdahulu. - Pake metode wawancara.	y.
3	4 Jan '24	ACC bab 1-3	y.
4	5 Januari '24	Questioner tidak di acc Perbaiki bab IV Siswainka dgn mesin masalah	y.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Maya Sapitri

NIM : 2030602190

Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 07 Mei 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Tanjung Telang, Kec. Prabumulih Barat

No. Telepon : 082184700141

E-mail : mayasapitri007@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1. SD 75 Prabumulih
2. SMP N 9 Prabumulih
3. MAA Almustajab Yogyakarta

